



**DIREKTORAT JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

# **LAPORAN TAHUNAN 2020**



## KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020”. Laporan Tahunan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2020, yang dijabarkan dalam Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Program dan kegiatan sebagai wujud implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Rencana Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Secara garis besar, Laporan ini menyajikan rangkuman capaian kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan sepanjang tahun 2020 pada setiap Unit Eselon II dalam rangka mewujudkan kedaulatan Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat yang selaras dengan agenda prioritas Kabinet Kerja “NAWACITA”. Pada tahun 2020, Peternakan mengalami kontraksi disebabkan menurunnya permintaan industri pemotongan hewan sebagai dampak pandemi COVID-19

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020. Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024. Akhir kata, semoga Laporan Tahunan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang akurat, tepat, dan akuntabel.

Direktur Jenderal,  
  
Nasrullah



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran .....	1
1.3. Ruang Lingkup .....	4
1.4. Kegiatan Fungsi dan Kegiatan Utama .....	5
<b>II. CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN PKH TAHUN 2020</b>	
2.1. Capaian Kinerja Makro Subsektor Peternakan .....	10
2.2. Capaian Kegiatan Prioritas .....	15
2.3. Capaian Kinerja Teknis .....	24
2.4. Capaian Kinerja Fungsi .....	32
2.5. Capaian Kinerja Anggaran .....	49
2.5. Capaian Kinerja Lainnya .....	52
<b>III. KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2021</b>	
3.1. Program dan Target Tahun 2021 .....	54
3.2. Alokasi Anggaran Tahun 2021 .....	54
3.3. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 .....	57
<b>IV. PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	58
<b>LAMPIRAN</b> .....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target dan Realisasi Capaian Akseptor Tahun 2020 .....	16
Tabel 2	Target dan Realisasi Kebuntingan Tahun 2020 .....	17
Tabel 3	Target dan Realisasi Kelahiran Tahun 2020 .....	19
Tabel 4	Lokasi Kegiatan Pengembangan 1000 Desa Sapi Tahun 2020 .....	22
Tabel 5	Capaian Kegiatan Pengembangan 1000 Desa Sapi Tahun 2020 .....	23
Tabel 6	Perkembangan Produksi Telur .....	25
Tabel 7	Populasi Ternak Tahun 2016 - 2020 .....	26
Tabel 8	Realisasi KUR Subsektor Peternakan Berdasarkan Komoditas Tahun 2020 .....	31
Tabel 9	Capaian Kinerja Fungsi Pakan Tahun 2020 .....	33
Tabel 10	Capaian Kinerja Fungsi Kesehatan Hewan Tahun 2020 .....	36
Tabel 11	Capaian Kinerja Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak Tahun 2020 .....	40
Tabel 12	Capaian Kinerja Fungsi Kesmavet Tahun 2020 .....	44
Tabel 13	Capaian Kinerja Fungsi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Tahun 2020 .....	47
Tabel 14	Capaian Kinerja Fungsi Kesekretariatan Tahun 2020 .....	48
Tabel 15	Realisasi Anggaran per Kegiatan .....	51
Tabel 16	Alokasi Anggaran per Kegiatan TA.2021 .....	56
Tabel 17	Alokasi Anggaran Pengadaan Ternak di UPT TA.2021 .....	56
Tabel 18	Alokasi Anggaran Pengadaan Ternak di OPD TA.2021 .....	57



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 .....	8
Grafik 2	Komposisi ASN Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 .....	9
Grafik 3	Produk Domestik Bruto (PDB) Subsektor Peternakan dan Sektor Pertanian Periode 2016-2020** .....	11
Grafik 4	Realisasi Investasi PMDN Subsektor Peternakan 2016 – 2020 .....	12
Grafik 5	Realisasi Investasi PMA Subsektor Peternakan 2016 – 2020 .....	13
Grafik 6	Perkembangan Tenaga Kerja Subsektor Peternakan 2016 - 2020 .....	14
Grafik 7	Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan 2019 - 2020.....	15
Grafik 8	Kinerja SIKOMANDAN Tahun 2020 .....	20
Grafik 9	Kinerja Produksi Daging Tahun 2020 .....	24
Grafik 10	Pertumbuhan Produksi dan Impor Susu Tahun 2018-2020 .....	25
Grafik 11	Kinerja Ekspor Komoditas Peternakan Tahun 2019-2020.....	30
Grafik 12	Realisasi anggaran per Jenis Belanja dan Kewenangan .....	50
Grafik 13	Alokasi Anggaran Ditjen Peternakan Dan Keswan TA.2021 .....	55



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Proses Bisnis Kegiatan SIKOMANDAN .....	6
Gambar 2	Proses Bisnis Kegiatan 1.000 Desa Sapi.....	8
Gambar 3	Realisasi Kredit Usaha Rakyat Subsektor Peternakan Tahun 2015-2020.....	8
Gambar 4	Kronologi Perubahan Anggaran Tahun 2020.....	50
Gambar 5	Penghargaan Unit Kerja Informatif Tahun 2020 Lingkup Kementerian Pertanian .....	52
Gambar 6	Penghargaan Unit Kerja Informatif Tahun 2020 Lingkup Kementerian Pertanian .....	52
Gambar 7	Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) .....	53
Gambar 8	Penghargaan UPT Berpredikat WBBM Nasional .....	53



## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Visi

Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 adalah Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Program tersebut merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan asal ternak yang selaras dengan agenda prioritas Kabinet Kerja “NAWACITA”.

Selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Pertanian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu Eselon I di bawah Kementerian Pertanian merumuskan visi sebagai berikut:

<b>VISI</b>
<b>Terwujudnya peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern</b>

Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bermakna:

1. Peternakan Indonesia yang berdaya saing mampu meningkatkan nilai tambah produk dan berorientasi ekspor. Daya saing subsektor peternakan adalah kemampuan subsektor peternakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas peternakan.
2. Peternakan Indonesia yang berkelanjutan adalah suatu proses yang terus menerus berbasis sumber daya lokal untuk penyediaan pangan masyarakat.
3. Kegiatan produksi peternakan dan kesehatan hewan tidak bertentangan dengan aspek agama, adat istiadat dan lingkungan hidup, bergerak lebih dinamis (maju), optimalisasi sumber daya secara mandiri, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang tepat guna (modern).

### 1.2. Misi

Upaya strategis dalam mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dirumuskan melalui misi organisasi yang tidak terlepas dari tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

<b>MISI</b>
<b>1. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.</b>
<b>2. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.</b>



MISI
3. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan

**1. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan**

Bibit dan benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Dari bibit/benih ternak yang berkualitas akan dihasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing. Pengembangan benih dan bibit ternak yang berkualitas harus mampu dihasilkan secara berkelanjutan berdasarkan potensi sumber daya lokal ternak yang dimiliki. Keragaman sumber daya lokal ternak yang merupakan kekuatan yang harus mampu dimanfaatkan sebagai penghasil bibit dan benih ternak yang berkualitas untuk menghasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing.

**2. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan**

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan, penggunaan bahan pakan lokal maupun *biomassa* ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul, pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.

**3. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat**

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk, disamping juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Disamping itu, kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat *emerging* dan *reemerging diseases*





melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah maupun antar negara. Adanya peningkatan status penyakit hewan, merupakan cerminan keberhasilan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dalam mendukung kedaulatan kesehatan hewan dan daya saing produk peternakan.

**4. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat**

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan *higiene* dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan serta pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar internasional.

**5. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing**

Potensi basis komoditas dan produk unggulan subsektor peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Daya saing subsektor peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan, baik nasional maupun internasional. Setidaknya ada beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan Indonesia, antara lain melalui: peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak; pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan, dan pasar); perbaikan sistem logistik; dan penyediaan informasi dan data; pengembangan inovasi dan teknologi; serta perluasan jaringan pada pasar untuk peternak.

**6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi professional dan modern**

Reformasi birokrasi akan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi. Pengembangan reformasi birokrasi yang efektif dan profesional, baik dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan maupun tata kelola akan mendorong kinerja organisasi semakin lebih baik. Misi Ditjen Peternakan dan Keswan di atas, sudah relevan dengan misi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian dan Meningkatkan Kualitas SDM dan Prasarana Kementerian Pertanian.



### 1.3. Arah Kebijakan dan Strategi

Sebagai penjabaran arah kebijakan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020 dalam mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan ditetapkan sebagai berikut:

#### 1. Penyelenggaraan peternakan yang sesuai dengan *Good Breeding* dan *Good Farming Practices*

*Good Breeding Practices* dan *Good Farming Practices* adalah pelaksanaan usaha peternakan di bidang pembibitan dan budidaya yang dilakukan secara baik mengikuti standar yang berlaku. *Good Breeding Practices* dan *Good Farming Practices* meliputi 4 (empat) aspek yaitu: sarana dan prasarana; proses produksi bibit; pelestarian lingkungan; serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Penyelenggaraan bibit/benih berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Penyediaan pakan yang cukup dan berkualitas berbasis bahan pakan lokal.
- c. Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

#### 2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan dan Kesehatan hewan

Peningkatan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk dari proses pengolahan hingga pemasaran peternakan. Daya saing merupakan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang dimiliki produk hewan nasional terhadap produk hewan negara lain. Peningkatan pada dua aspek nilai tambah dan daya saing akan memberikan manfaat terhadap ekonomi nasional dari sektor pertanian. Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Pengolahan, distribusi dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing.
- b. Peningkatan kelembagaan, usaha dan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

#### 3. Pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Pengelolaan kesehatan hewan bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan hewan agar terbebas dari penyakit hewan. Pengelolaan kesehatan hewan meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; pengelolaan obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner meliputi: pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; penjaminan hygiene dan sanitasi; pengembangan kedokteran dan perbandingan; serta penanganan bencana.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:



- a. Meningkatkan kesehatan hewan untuk kesehatan manusia.
- b. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.

#### 4. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tata laksana, area penataan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik. Strategi pelaksanaan dilakukan melalui optimasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

#### 1.4. Kegiatan Fungsi dan Kegiatan Utama

Dalam mendukung pencapaian sasaran pada program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020 melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Direktorat Teknis meliputi:

KEGIATAN
1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak.
2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
3. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak.
4. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan.
6. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.

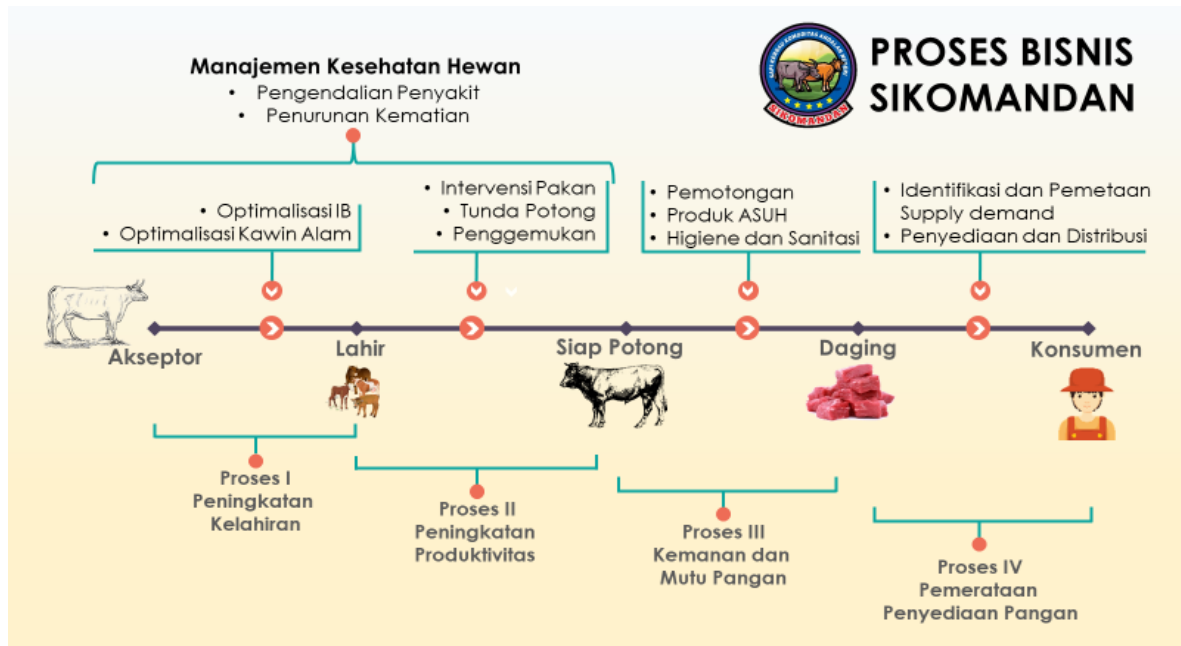
Selain kegiatan yang tercantum sebagaimana disebutkan di atas, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga melaksanakan Kegiatan Prioritas dalam rangka peningkatan populasi sapi, produksi daging sapi untuk pemenuhan kecukupan protein hewani dan produk hewan dalam negeri, serta peningkatan kesejahteraan peternak yaitu:

##### a. Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN)

Pada hakikatnya, kegiatan SIKOMANDAN merupakan kesinambungan kegiatan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) dengan cakupan *output* kegiatan yang diperluas bukan hanya sekedar pada penambahan populasi akan tetapi juga sampai dengan penyediaan produksi dalam negeri. Oleh karena itu, proses bisnis kegiatan SIKOMANDAN meliputi 4 (empat) proses kegiatan



yang terintegrasi dan saling menunjang menjadi satu kesatuan kegiatan yang berkelanjutan.



**Gambar 1. Proses Bisnis Kegiatan SIKOMANDAN**

### 1. *Proses Bisnis Peningkatan Kelahiran*

Pada proses bisnis ini kegiatan utama meliputi identifikasi akseptor, pelayanan perkawinan IB, pemeriksaan kebuntingan dan pelaporan kelahiran. Untuk menunjang kegiatan tersebut penyediaan input bahan (Semen Beku, N2 cair, Kontainer, dan Bahan Lainnya) dan biaya operasional (BOP dan insentif pelaporan) disiapkan baik melalui anggaran APBN maupun APBD.

Untuk menjamin keberhasilan, pada kegiatan ini juga didukung dengan kegiatan pengendalian penyakit termasuk penanganan gangguan reproduksi serta pemberian vitamin dan pengobatan untuk menekan angka kematian.

### 2. *Proses Bisnis Peningkatan Produktivitas*

Kegiatan pada proses bisnis ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sapi dan kerbau dalam menghasilkan daging melalui kegiatan penyediaan pakan secara cukup serta penggemukan sapi dan kerbau sebelum dipotong, sehingga dihasilkan produksi daging yang optimal. Pada proses bisnis ini juga ditunjang dengan kegiatan pengendalian penyakit sehingga ternak dapat tumbuh dengan baik dan menekan angka kematian.

### 3. *Proses Bisnis Keamanan dan Mutu Pangan*

Proses bisnis ini bertujuan untuk menghasilkan produk daging yang aman dan berkualitas. Pada tahapan ini yang merupakan kegiatan hilir untuk

menghasilkan daging melalui pemotongan sesuai dengan aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

4. *Proses Bisnis Distribusi dan Pemasaran*

Pada proses bisnis ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan daging di seluruh wilayah secara cukup, maka diperlukan kegiatan identifikasi dan pemetaan kemampuan produksi maupun kebutuhan pada setiap daerah dengan ditunjang kemudahan sarana distribusi serta informasi kebutuhan pasar.

Dalam pelaksanaannya, keempat proses bisnis harus saling bersinergi dan memperkuat dalam menghasilkan output tersedianya daging sapi dan/atau kerbau untuk masyarakat.

**b. Program Pengembangan 1.000 (Seribu) Desa Sapi**

Berdasarkan Surat Perintah Menteri Pertanian No. 129/KP.410/M/8/2020 tanggal 19 Agustus 2020, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menerima amanat untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan 1.000 (Seribu) Desa Sapi yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan pengembangan Sapi Bakalan dan Sapi Indukan dalam rangka pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi petani yang akan diimplementasikan di 5 (lima) kabupaten yaitu Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung; Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur; Kab. Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat; Kab. Ngada, Prov. Nusa Tenggara Timur; dan Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan sebagai *pilot project*. Program ini telah bersinergi dengan *grand design*, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024.

Konsep pelaksanaan kegiatan 1.000 (Seribu) Desa Sapi pada setiap provinsi penerima manfaat adalah dari hulu hingga hilir yaitu berupa pemberian bantuan kandang komunal sebanyak 10 (sepuluh) unit, bantuan sapi indukan sebanyak 500 (lima ratus) ekor dan sapi bakalan sebanyak 500 (lima ratus) ekor, bantuan pakan sapi pembiakan dan penggemukan untuk periode 3 (tiga) bulan, bantuan alat dan mesin pengolah pakan sebanyak 5 (lima) unit, bantuan sarana dan prasarana pengolahan biogas dan pupuk cair masing-masing 5 (lima) unit, bantuan timbangan digital 5 (lima) unit. Selanjutnya, selain pemberian bantuan tersebut di atas, juga terdapat pendampingan dan pembinaan guna tersusunya profil kelembagaan calon korporasi petani di provinsi penerima manfaat.

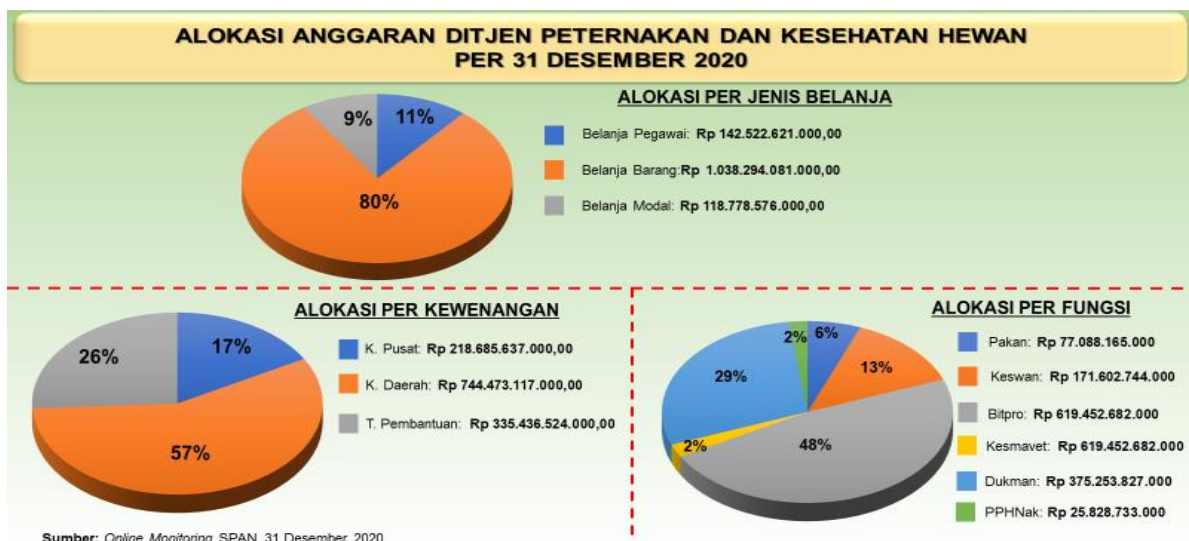




Gambar 2. Proses Bisnis Kegiatan 1.000 Desa Sapi

### 1.5. Anggaran

Dukungan anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada T.A. 2020 terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sektoral yang dialokasikan pada 1 (satu) Satuan Kerja Kantor Pusat, 22 (dua puluh dua) Satuan Kerja Kantor Daerah dan 34 (tiga puluh empat) Satuan Kerja Tugas Pembantuan Provinsi dengan pagu anggaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.299.595.278.000,00 (satu triliyun dua ratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Komposisi anggaran berdasarkan Jenis Belanja, Kewenangan dan Fungsi tersaji pada Gambar 3.

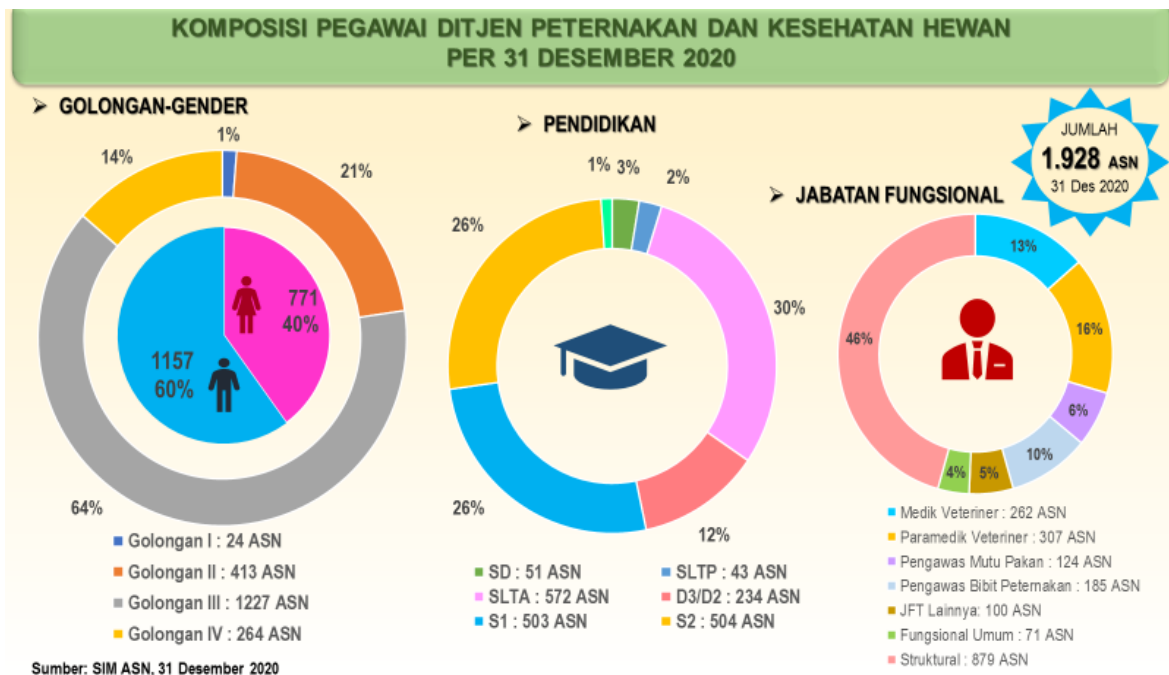


Grafik 1. Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020



Selanjutnya, Sumber Daya Manusia (*man*) merupakan hal penting dalam pelaksanaan suatu organisasi, selain dukungan anggaran (*money*). Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2020 sebanyak 1.928 orang, dengan persebaran sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai per Unit Kerja: i) Sekretariat Direktorat Jenderal sebanyak 121 orang; ii) Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak sebanyak 62 orang; iii) Direktorat Pakan sebanyak 48 orang; iv) Direktorat Kesehatan Hewan sebanyak 69 orang; v) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner sebanyak 44 orang; vi) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebanyak 47 orang; vii) Kantor Daerah (UPT vertikal) sebanyak 1.537 orang.
2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan: i) Golongan IV sebanyak 264 orang; ii) Golongan III sebanyak 1.227 orang; iii) Golongan II sebanyak 413 orang; iv) Golongan I sebanyak 24 orang.
3. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan: i) S-3 sebanyak 21 orang; ii) S-2 sebanyak 504 orang; iii) S-1/D4 sebanyak 503 orang; iv) Sarjana Muda/D3/D2 sebanyak 234 orang; v) SLTA sebanyak 572 orang; vi) SLTP sebanyak 43 orang; vii) SD sebanyak 51 orang.
4. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin: i) Laki-laki sebanyak 1.157 orang; ii) Perempuan sebanyak 771 orang.
5. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional: i) Medik Veteriner sebanyak 262 orang; ii) Paramedik Veteriner sebanyak 307 orang; iii) Pengawas Mutu Pakan sebanyak 124 orang; iv) Pengawas Bibit Ternak sebanyak 185 orang; v) Jabatan Fungsional Tertentu lainnya sebanyak 100 orang; vi) Jabatan Fungsional Umum sebanyak 71 orang; vii) Struktural 879 orang.



**Grafik 2. Komposisi ASN Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020**



## II. CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2020

### 2.1. Capaian Kinerja Makro Subsektor Peternakan

Salah satu indikator dampak (*impact*) dari keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah indikator kinerja ekonomi makro yang terkait pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, antara lain kinerja (a). Produk Domestik Bruto (PDB); (b).Investasi; (c). Penyerapan Tenaga Kerja; (d). Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) dengan uraian sebagai berikut:

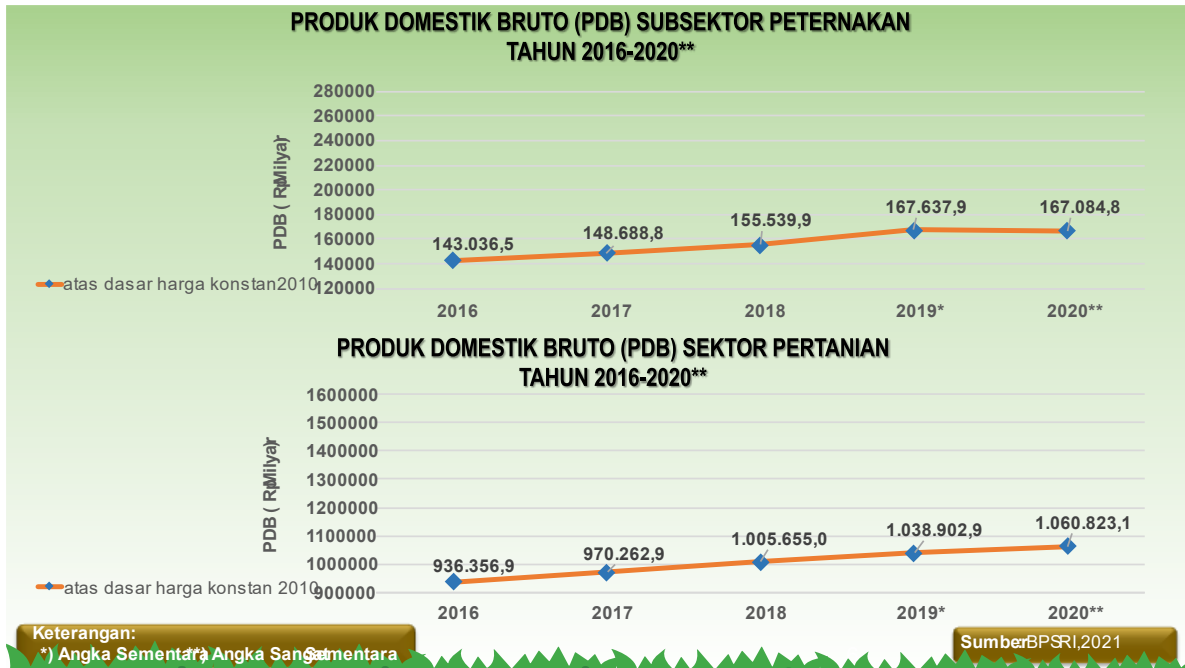
#### a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), PDB atas harga konstan Subsektor Peternakan tahun 2020\*\* (Angka Sangat Sementara) sebesar Rp 167.084,8 Milyar atau mengalami penurunan sebesar 0,33% dibandingkan tahun 2019\* (Angka Sementara). Subsektor Peternakan mengalami kontraksi disebabkan menurunnya permintaan industri pemotongan hewan (penurunan produksi daging ayam ras dan daging sapi/kerbau) sebagai dampak pandemi *COVID-19*. Upaya yang dilakukan oleh Ditjen PKH untuk meningkatkan PDB Subsektor Peternakan ialah dengan melakukan promosi, meningkatkan daya saing produk asal ternak dan efisiensi usaha, serta mendorong ekspor. Hal ini bertujuan untuk mendorong produksi dan nilai tambah komoditas peternakan.

Selanjutnya, walaupun PDB Subsektor Peternakan pada tahun 2020\*\* (Angka Sangat Sementara) mengalami kontraksi, PDB Subsektor Peternakan selama periode tahun 2016-2020\*\* menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan PDB Sektor Pertanian. Pada tahun 2016, PDB Subsektor Peternakan mencapai Rp 143.036,5 Milyar dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 167.084,8 Milyar, atau meningkat rata-rata 4,00% per tahun, sedangkan PDB Sektor Pertanian tahun 2016 mencapai Rp 936.356,9 Milyar meningkat menjadi Rp 1.060.823,1 Miliar pada tahun 2020 atau meningkat rata-rata 3,17% per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Subsektor Peternakan berpeluang sebagai sumber pertumbuhan baru Sektor Pertanian di masa mendatang.





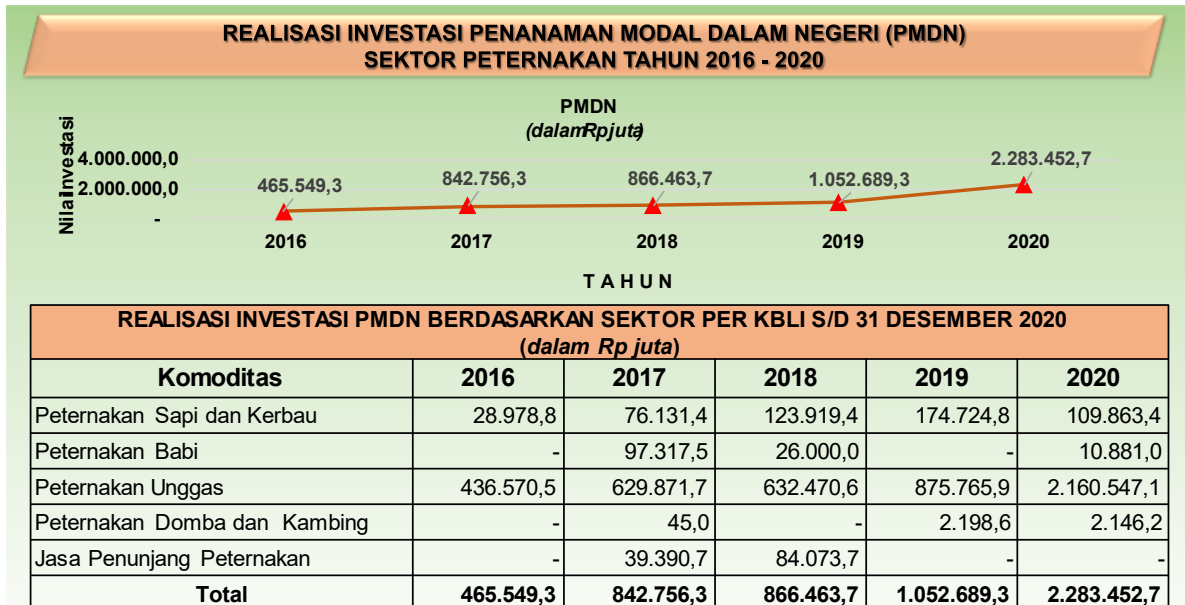


**Grafik 3. Produk Domestik Bruto (PDB) Subsektor Peternakan dan Sektor Pertanian Periode 2016-2020\*\***

### b. Investasi

Berdasarkan data investasi yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi di Subsektor Peternakan mengalami peningkatan, baik dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal asing (PMA). Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Subsektor Peternakan tahun 2020 sebesar Rp 2.283.452,7 juta dan tahun 2019 sebesar Rp 1.052.689,3 atau mengalami peningkatan sebesar 116,92%. Dominasi peningkatan tersebut masih terdapat pada peternakan unggas. Selama periode tahun 2016-2020 Subsektor Peternakan tumbuh positif dengan nilai realisasi PMDN pada tahun 2016 sebesar Rp 465.549,3 juta dan realisasi kumulatif hingga tahun 2020 sebesar Rp 5.510.911,3 juta atau dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 55,56%.

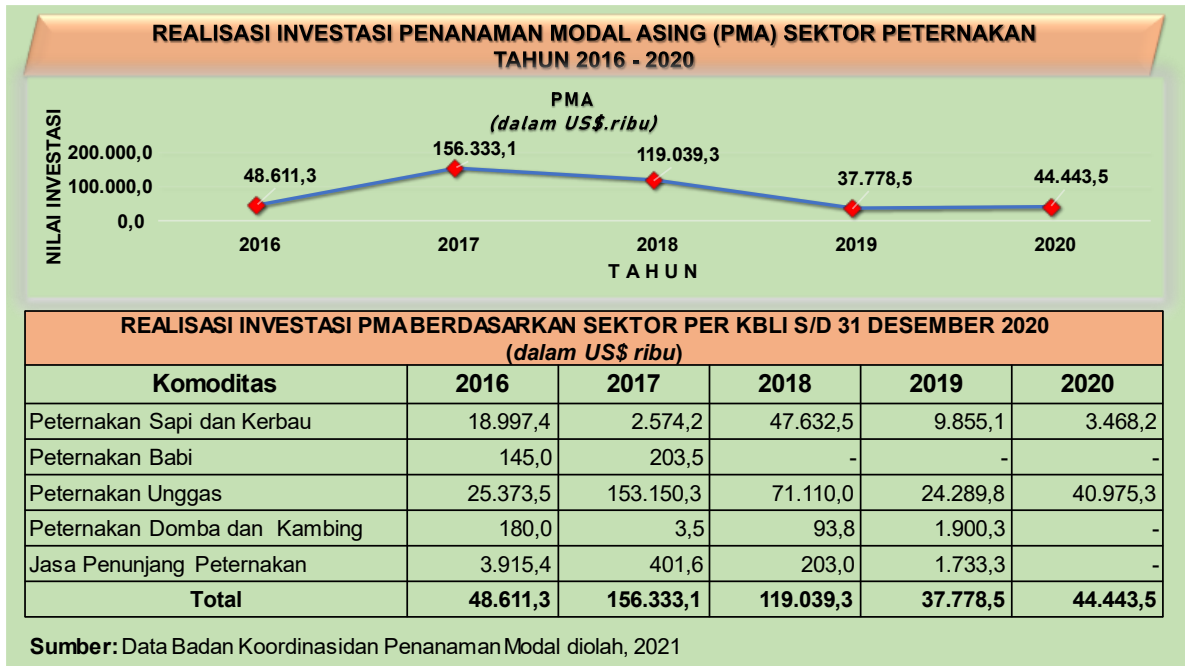
Peningkatan investasi PMDN Subsektor Peternakan unggas karena adanya beberapa upaya dari Pemerintah, diantaranya: a).Pemerintah memfasilitasi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga KUR sebesar 6%; b).Fasilitasi peningkatan akses pembiayaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN; c). Peningkatan pemanfaatan kemitraan antara pelaku usaha menengah besar dengan peternak mikro kecil.



Sumber: Data Badan Koordinasi dan Penanaman Modal diolah, 2021

#### **Grafik 4. Realisasi Investasi PMDN Subsektor Peternakan Tahun 2016-2020**

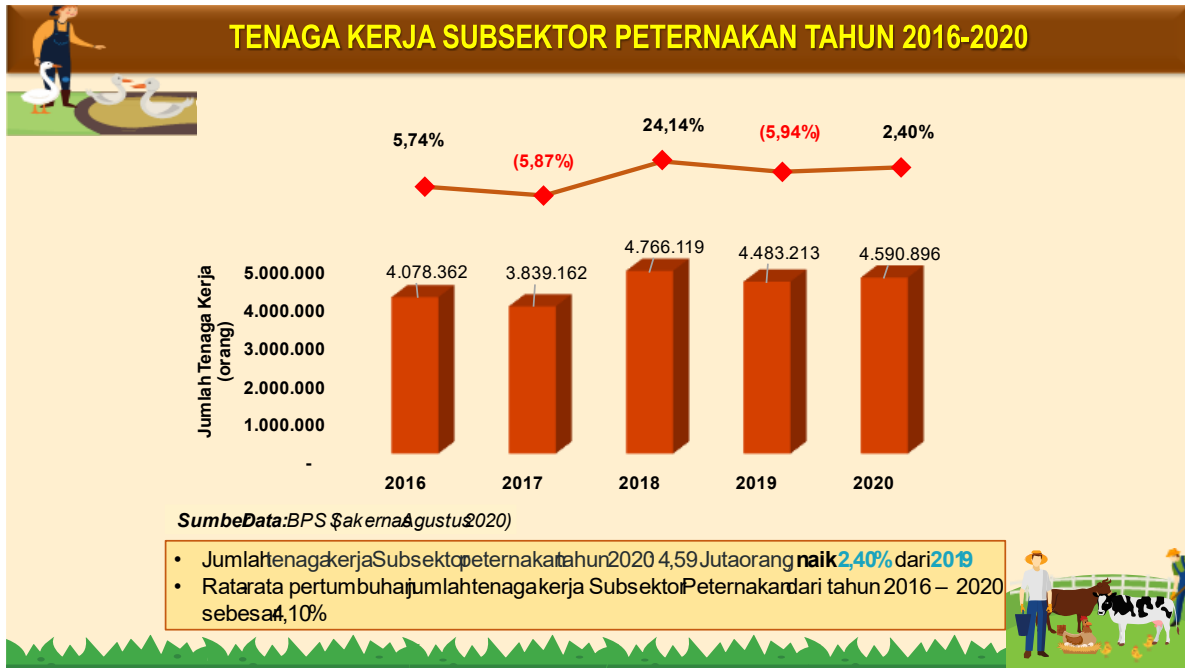
Selanjutnya, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada Subsektor Peternakan tahun 2020 sebesar US\$ 44.443,5 ribu dan tahun 2019 sebesar US\$ 37.778,5 atau mengalami peningkatan sebesar 17,64%. Dominasi peningkatan tersebut juga masih terdapat pada peternakan unggas sebagaimana terjadi pada PMDN. Sebaliknya, pada tahun 2020 investasi PMA peternakan sapi/kerbau mengalami penurunan sebesar 64,81%. Penurunan investasi tersebut karena adanya peraturan dari Pemerintah Australia yang membatasi perdagangan sapi ke seluruh negara mitra termasuk Indonesia. Selama periode tahun 2016-2020, Subsektor Peternakan tumbuh secara fluktuatif dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 221,60% serta rata-rata pertumbuhan tahunan PMA sebesar 36,78%.



**Grafik 5. Realisasi Investasi PMA Subsektor Peternakan  
Tahun 2016-2020**

### c. Penyerapan Tenaga Kerja

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Indonesia. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Agustus 2020, tenaga kerja yang bekerja di Subsektor Peternakan sebanyak 4.590.896 orang. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja Subsektor Peternakan sebesar 2,40% apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Rata-rata pertumbuhan jumlah tenaga kerja Sub Sektor Peternakan dari tahun 2016 – 2020 sebesar 4,10%. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja sub sektor peternakan dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 6.

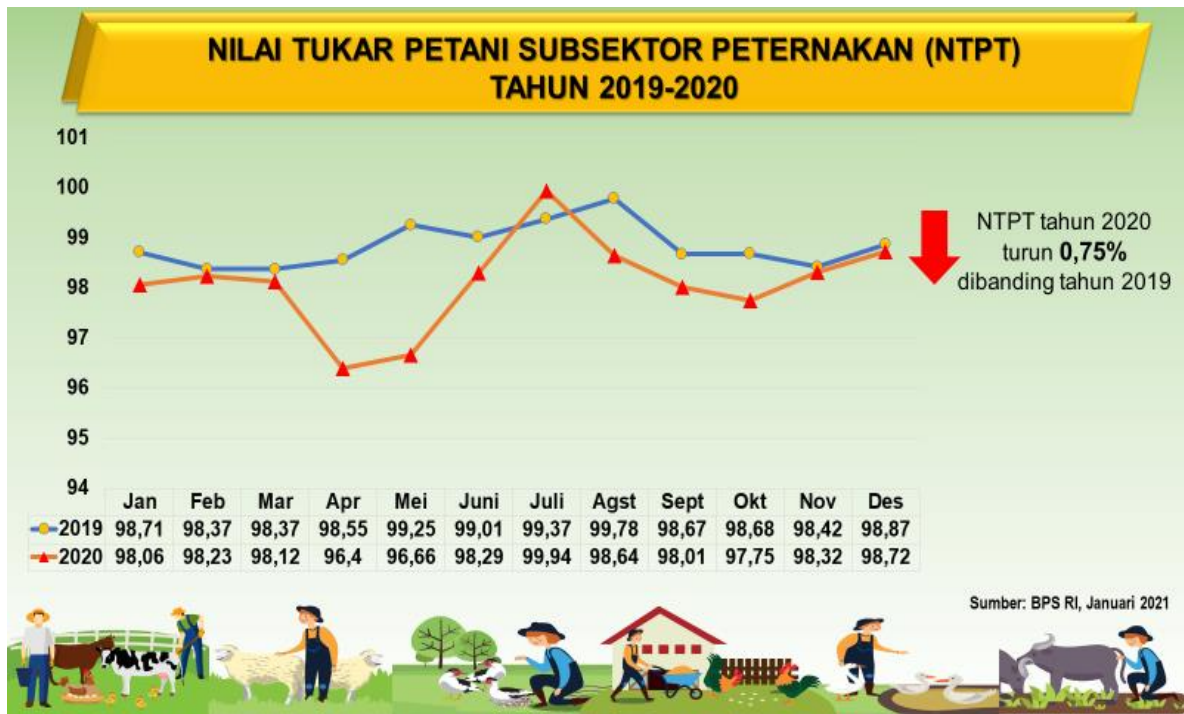


**Grafik 6. Perkembangan Tenaga Kerja Subsektor Peternakan Tahun 2016-2020**

#### d. Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT)

Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani peternak (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani peternak (Ib). NTPT merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani peternak di perdesaan. NTPT juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk peternakan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Rata-rata NTPT tahun 2020 sebesar 98,10 sedangkan rata-rata NTPT tahun 2019 sebesar 98,84 atau mengalami penurunan sebesar 0,75% dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan salah satunya oleh penurunan harga ayam broiler hidup (*livebird*) dan kenaikan beberapa harga biaya produksi seperti pakan dan *Day Old Chick* (DOC). Upaya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan NTPT di atas 100 dilakukan dengan meningkatkan indeks yang diterima peternak berupa peningkatan harga ternak dan produk hasil ternak serta menurunkan indeks yang harus dibayar peternak, utamanya komponen biaya produksi.



**Grafik 7. Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan Tahun 2019-2020**

## 2.2. Capaian Kegiatan Prioritas

Pada tahun 2020, capaian kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka peningkatan populasi sapi, produksi daging sapi untuk pemenuhan kecukupan protein hewani dan produk hewan dalam negeri, serta peningkatan kesejahteraan peternak adalah sebagai berikut:

### a. Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN)

Pelaksanaan kegiatan SIKOMANDAN pada tahun 2020 di 34 provinsi belum dapat dilaksanakan secara terintegrasi sesuai dengan proses bisnis karena sebagian besar anggaran mengalami *refocusing* guna penanganan pandemi *Covid-19*. Secara nasional capaian realisasi jumlah akseptor terhadap target di bulan Januari-Desember 2020, sebesar 3.545.199 akseptor (142,09%) dari target akseptor 2.495.007 akseptor. Selama periode bulan Januari-Desember 2020, realisasi jumlah akseptor tertinggi dicapai oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah akseptor 1.732.989 akseptor atau berkontribusi sebesar 48,88% terhadap capaian nasional. Capaian akseptor terbesar kedua diraih oleh Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah akseptor 607.767 akseptor atau berkontribusi sebesar 17,14% terhadap capaian nasional.

Tingginya kontribusi jumlah akseptor di kedua provinsi tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah merupakan sentra sapi dan termasuk dalam kawasan intensif untuk budidaya sapi yang dikandangkan. Selain itu, tingginya jumlah akseptor di kedua provinsi tersebut menguatkan pendapat bahwa pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) di kawasan budidaya intensif sangat efektif untuk mendukung program SIKOMANDAN nasional.



Tabel 1 Target dan Realisasi Capaian Akseptor Tahun 2020

No	Provinsi	Akseptor		
		Target	Realisasi	%
1	Aceh	40.570	45.850	113,01%
2	Sumatera Utara	58.300	105.032	180,16%
3	Sumatera Barat	48.360	74.350	153,74%
4	Riau	22.580	34.091	150,98%
5	Jambi	17.940	19.906	110,96%
6	Sumatera Selatan	31.380	43.327	138,07%
7	Bengkulu	9.440	10.271	108,80%
8	Lampung	122.650	208.726	170,18%
9	Bangka Belitung	800	1.171	146,38%
10	Kepulauan Riau	820	963	117,44%
11	DKI	1.290	907	70,31%
12	Jawa Barat	98.900	122.993	124,36%
13	Jawa Tengah	448.100	607.767	135,63%
14	DIY	52.300	100.556	192,27%
15	Jawa Timur	1.212.300	1.732.989	142,95%
16	Banten	6.500	2.678	41,20%
17	Bali	50.000	77.388	154,78%
18	NTB	66.000	121.328	183,83%
19	NTT	10.300	8.781	85,25%
20	Kalimantan Barat	16.220	17.710	109,19%
21	Kalimantan Tengah	4.350	2.579	59,29%
22	Kalimantan Selatan	27.800	34.216	123,08%
23	Kalimantan Timur	7.650	6.969	91,10%
24	Kalimantan Utara	1.900	1.573	82,79%
25	Sulawesi Utara	11.250	10.798	95,98%
26	Sulawesi Tengah	20.000	24.302	121,51%
27	Sulawesi Selatan	59.900	77.276	129,01%
28	Sulawesi Tenggara	15.100	14.640	96,95%
29	Gorontalo	16.000	20.608	128,80%



No	Provinsi	Akseptor		
		Target	Realisasi	%
30	Sulawesi Barat	7.500	8.384	111,79%
31	Maluku	2.307	2.761	119,68%
32	Maluku Utara	1.500	1.236	82,40%
33	Papua Barat	1.500	1.409	93,93%
34	Papua	3.500	1.664	47,54%
<b>TOTAL</b>		<b>2.495.007</b>	<b>3.545.199</b>	<b>142,09%</b>

Sumber: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2020.

Deteksi kebuntingan merupakan komponen penting dalam manajemen reproduksi, khususnya pada industri sapi perah dengan tujuan untuk mengevaluasi keberhasilan IB yang diakibatkan oleh kematian embrio dini. Pada umumnya, petugas mendeteksi kebuntingan dengan cara eksplorasi rektal pada 60 hari setelah IB dan memperhatikan perubahan perilaku estrus, maka peternak menyimpulkan bahwa ternaknya bunting atau sebaliknya. Secara nasional capaian realisasi jumlah kebuntingan terhadap target di bulan Januari-Desember 2020, sebesar 1.891.426 ekor (107,64%) dari target 1.757.130 ekor.

**Tabel 2 Target dan Realisasi Kebuntingan Tahun 2020**

No	Provinsi	Kebuntingan (Ekor)		
		Target	Realisasi	%
1	Aceh	28.276	37.918	134,10%
2	Sumatera Utara	39.240	67.728	172,60%
3	Sumatera Barat	33.508	32.470	96,90%
4	Riau	15.809	25.950	164,15%
5	Jambi	12.032	14.503	120,54%
6	Sumatera Selatan	21.624	26.333	121,78%
7	Bengkulu	6.652	7.633	114,75%
8	Lampung	85.160	133.255	156,48%
9	Bangka Belitung	560	1.119	199,82%
10	Kepulauan Riau	576	553	96,01%
11	DKI	1.032	577	55,91%
12	Jawa Barat	72.660	87.963	121,06%
13	Jawa Tengah	314.760	275.854	87,64%



No	Provinsi	Kebuntingan (Ekor)		
		Target	Realisasi	%
14	DIY	36.840	36.555	99,23%
15	Jawa Timur	861.940	864.330	100,28%
16	Banten	3.350	2.417	72,15%
17	Bali	35.000	35.307	100,88%
18	NTB	44.400	70.336	158,41%
19	NTT	7.120	9.596	134,78%
20	Kalimantan Barat	11.376	10.262	90,21%
21	Kalimantan Tengah	2.865	1.870	65,27%
22	Kalimantan Selatan	18.920	31.747	167,80%
23	Kalimantan Timur	5.370	6.073	113,09%
24	Kalimantan Utara	1.330	1.383	103,98%
25	Sulawesi Utara	7.875	8.202	104,15%
26	Sulawesi Tengah	14.000	16.016	114,40%
27	Sulawesi Selatan	41.660	54.011	129,65%
28	Sulawesi Tenggara	10.580	10.998	103,95%
29	Gorontalo	11.200	11.003	98,24%
30	Sulawesi Barat	5.250	4.207	80,13%
31	Maluku	1.615	1.817	112,51%
32	Maluku Utara	1.050	936	89,14%
33	Papua Barat	1.050	1.169	111,33%
34	Papua	2.450	1.335	54,49%
<b>TOTAL</b>		<b>1.757.130</b>	<b>1.891.426</b>	<b>107,64%</b>

**Sumber:** Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2020.

Kelahiran baik yang berasal dari IB atau kawin alam pada program SIKOMANDAN merupakan upaya peningkatan populasi sapi dan kerbau lokal untuk mengurangi dominansi impor. Realisasi kelahiran pada tahun 2020 sebesar 2.300.730 ekor (114,43%) dari target tahunan 2.010.661 ekor, dengan alokasi semen beku target 4.648.547 dosis realisasi 4.648.547 dosis (100%).





Tabel 3 Target dan Realisasi Kelahiran Tahun 2020

No	Provinsi	Lahir (Ekor)		
		Target	Realisasi	%
1	Aceh	42.448	41.385	97,50%
2	Sumatera Utara	94.816	112.618	118,78%
3	Sumatera Barat	47.157	41.046	87,04%
4	Riau	22.728	27.120	119,32%
5	Jambi	19.329	19.747	102,16%
6	Sumatera Selatan	27.962	23.707	84,78%
7	Bengkulu	14.487	13.775	95,09%
8	Lampung	81.744	126.031	154,18%
9	Bangka Belitung	1.354	1.253	92,54%
10	Kepulauan Riau	1.368	925	67,62%
11	DKI	929	664	71,47%
12	Jawa Barat	65.394	75.242	115,06%
13	Jawa Tengah	287.534	286.068	99,49%
14	DIY	33.156	43.278	130,53%
15	Jawa Timur	775.746	1.029.400	132,70%
16	Banten	6.415	2.856	44,52%
17	Bali	57.000	58.654	102,90%
18	NTB	91.804	112.344	122,37%
19	NTT	57.408	63.963	111,42%
20	Kalimantan Barat	16.188	13.832	85,45%
21	Kalimantan Tengah	9.379	8.954	95,47%
22	Kalimantan Selatan	20.428	26.831	131,34%
23	Kalimantan Timur	13.333	7.820	58,65%
24	Kalimantan Utara	2.047	1.405	68,64%
25	Sulawesi Utara	13.038	11.083	85,01%
26	Sulawesi Tengah	29.600	26.284	88,80%
27	Sulawesi Selatan	88.494	54.901	62,04%
28	Sulawesi Tenggara	30.772	28.902	93,92%
29	Gorontalo	27.080	17.088	63,10%



No	Provinsi	Lahir (Ekor)		
		Target	Realisasi	%
30	Sulawesi Barat	9.825	9.869	100,45%
31	Maluku	5.703	4.650	81,54%
32	Maluku Utara	5.195	1.585	30,51%
33	Papua Barat	3.495	3.625	103,72%
34	Papua	7.305	3.825	52,36%
<b>TOTAL</b>		<b>2.010.661</b>	<b>2.300.730</b>	<b>114,43%</b>

Sumber: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2020.



**Grafik 8. Kinerja SIKOMANDAN Tahun 2020**

Peningkatan produktivitas melalui kegiatan penanaman dan pengembangan Hijauan Pakan Ternak berkualitas tahun 2020 dengan target penanaman Hijauan Pakan Ternak setelah dilakukan penyesuaian output dan anggaran adalah seluas 91 Hektar yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, Bali, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah Bangka Belitung dan Maluku Utara.

Keamanan dan Mutu Pangan didukung dengan kegiatan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif. Total ternak betina yang masuk ke Rumah Potong Hewan (RPH) sebanyak 140.463 ekor dimana 8.833 ekor (6,24%) merupakan ternak betina produktif. Dari 8.833 ekor ternak betina produktif ini sebanyak 7.733 ekor (87,55%) dilakukan pemotongan dan sebanyak 1.100 ekor (12,45%) berhasil ditolak untuk dipotong/ berhasil dikendalikan.



Dukungan Kesehatan Hewan yaitu kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular pada sapi/kerbau difokuskan pada 3 (tiga) jenis penyakit yaitu *Brucellosis*, *Anthrax*, dan Jembrana dengan target vaksin sebesar 380.100 dosis, Penanganan Gangguan Reproduksi serta Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SIKOMANDAN adalah (i) Adanya *refocusing* anggaran kegiatan yang berdampak pada berkurangnya target dan input kegiatan sehingga proses bisnis SIKOMANDAN belum dapat berjalan secara simultan; (ii) Kurang tertibnya petugas dalam menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Adapun upaya tindak lanjut atas kendala tersebut adalah (i) Mengoptimalkan kegiatan dan anggaran yang tersedia mendukung kegiatan sehingga dapat berjalan sesuai dengan proses bisnis; (ii) Mendorong kesadaran dan ketaatan Petugas dalam menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

#### **b. Program Pengembangan 1.000 (Seribu) Desa Sapi**

Pada tahun 2020, target lokasi kegiatan pengembangan 1.000 (seribu) Desa Sapi dilaksanakan di 5 (lima) provinsi sebagaimana terlampir pada Tabel 4 dengan masing-masing kelompok menerima 500 ekor sapi indukan dan 500 ekor sapi bakalan dengan sarana dan prasarana pendukungnya (kandang, pakan, pengolahan biogas dan pupuk cair serta obat-obatan). Namun, ditengah pelaksanaan kegiatan, penyedia sapi bakalan dan sapi indukan untuk lokasi kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengundurkan diri karena ketidakmampuan dalam penyediaan ternak.

Jumlah sapi bakalan yang telah terdistribusi hingga 31 Desember 2020 adalah sejumlah 413 ekor (16,52%) dari target 2.500 ekor dengan rincian 378 ekor untuk Satker Pelaksana BBIB Singosari dan 35 ekor untuk Satker Pelaksana BVet Lampung. Selanjutnya, jumlah sapi indukan yang telah terdistribusi hingga 31 Desember 2020 adalah sejumlah 530 ekor (21,20%) dari target 2.500 ekor dengan rincian 101 ekor untuk Satker Pelaksana BBIB Singosari dan 429 ekor untuk Satker Pelaksana BVet Lampung. Kedua Satker Pelaksana melakukan adendum kontrak terkait perpanjangan masa penyelesaian pekerjaan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan akan Dilanjutkan Menimbang pada Tahun Anggaran 2021.

Pendistribusian bantuan pakan untuk 5 (lima) provinsi telah selesai 100% dilaksanakan. Satker BBIB Singosari dengan lokasi kegiatan di Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masing-masing mendapatkan pakan olahan pembiakan sebanyak 135 ton dan pakan olahan penggemukkan sebanyak 225 ton. Selanjutnya, Satker BVet Lampung dengan lokasi kegiatan di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan masing-masing mendapatkan pakan olahan pembiakan sebanyak 180 ton dan pakan olahan penggemukkan sebanyak 300 ton.



Tabel 4 Lokasi Kegiatan Pengembangan 1.000 Desa Sapi Tahun 2020

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK
1.	Jawa Timur	Probolinggo	Lumbang	Negororejo Lumbang Poktan Wonogoro. Sapih Purut	Genting Makmur Jaya Baru Muncul Makmur III Mukti Jaya I Margi Santoso III
2	Nusa Tenggara Barat	Ngada	Riung Barat	Wolomeze Wolomeze II Ngara I Ria I Ria	Ranch Wolomeze Ranch Wolomeze 11. 1 Ranch Ngara II Ranch Ria I Ranch Ria
3	Nusa Tenggara Timur	Lombok Tengah	Pujut	Mertak Sukadana Pengengat Bangket Parak Teruwai	Mekar Jati Mele Maju Tandur Besi Dui Urip Tunas Karya II
4	Lampung	Lampung Selatan	Tanjung Sari	Wonodadi Wawasan Purwodadi Dalam Bangunsari Sidomukti	Barokah Jaya Bumi Asih Sejahtera Sukamaju II Sumber Rezeki Sudi Makmur III
5	Sulawesi Selatan	Gowa	Bontonompo	Kalase'rena Tamallayang Bontolangkasa Bontolangkasa Utara Bategulung	Ballaparang Balumbungan Alerang I Juluero Cipta Wahana

**Sumber:** Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2020.

Pendistribusian paket obat-obatan dan vitamin, unit pengolahan biogas dan pupuk cair, mesin pencacah rumput, timbangan digital serta bantuan uang kandang untuk 5 (lima) provinsi telah selesai 100% dilaksanakan. Selanjutnya, untuk kegiatan Bimbingan Teknis dan Penguatan Kelembagaan telah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I pada 13-14 Oktober 2020 dan Tahap II pada 20-23 Oktober 2020. Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan pada setiap provinsi lokasi kegiatan dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas yang Membidangi Fungsi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan, baik Provinsi maupun Kabupaten, Bhabinsa/Bhabinkamtibmas atau unsur TNI AD dan instansi terkait lainnya seperti Perguruan Tinggi yang dilaksanakan setiap minggu ke lokasi penerima manfaat.



**Tabel 5** Capaian Kegiatan Pengembangan 1.000 Desa Sapi Tahun 2020

No	Jenis Bantuan	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	Sapi Bakalan	ekor	2.500	413	16,52%
2	Sapi Indukan	ekor	2.500	530	21,20%
3	Pakan Pembiakan	ton	765	765	100,00%
4	Pakan Penggemukan	ton	1.275	1.275	100,00%
5	Obat dan Vitamin	paket	25	25	100,00%
6	Kandang Pembiakan	unit	25	25	100,00%
7	Kandang Penggemukan	unit	25	25	100,00%
8	Pengolahan Biogas	unit	25	25	100,00%
9	Pengolahan Pupuk Cair	unit	25	25	100,00%
10	Timbangan Digital	unit	25	25	100,00%
11	Mesin Pencacah Rumput	unit	25	25	100,00%

**Sumber:** Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2020.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengembangan 1.000 (Seribu) Desa Sapi antara lain: (i) Waktu pelaksanaan program kegiatan yang singkat; (ii) Penentuan pemenang pada proses pengadaan Barang/Jasa dengan tender cepat didasarkan pada penawaran dengan harga terendah sehingga Kelompok Kerja (Pokja) tidak dapat melakukan verifikasi kinerja, kesiapan, dan kemampuan finansial pemenang. Sebagian besar Penyedia adalah pemenang di beberapa tender di Kementerian/Lembaga lainnya yang tidak spesifik di bidang peternakan; (iii) Spesifikasi berat minimal 350 kg untuk sapi indukan dan 300 kg untuk sapi bakalan yang diterima di Kelompok Ternak menjadi kendala untuk memperoleh sapi dengan berat melebihi spesifikasi karena terkait risiko penyusutan saat transportasi pendistribusian sapi; (iv) Pendistribusian pakan pada bulan Desember merupakan musim tanam padi, sehingga berpengaruh pada ketersediaan Hijauan Makanan Ternak (HMT); (v) Korporasi yang dibentuk belum siap menangani masalah yang dihadapi oleh kelompok terkait dengan terbatasnya modal yang dimiliki.

Upaya tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut diatas antara lain: (i) Koordinasi berkelanjutan antara Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Satker Pelaksana, Dinas Provinsi/Kabupaten dan Kelompok Penerima Manfaat; (ii) Koordinasi berkelanjutan dengan Penyedia Sapi guna menyelesaikan kekurangan pekerjaan penyediaan sapi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan



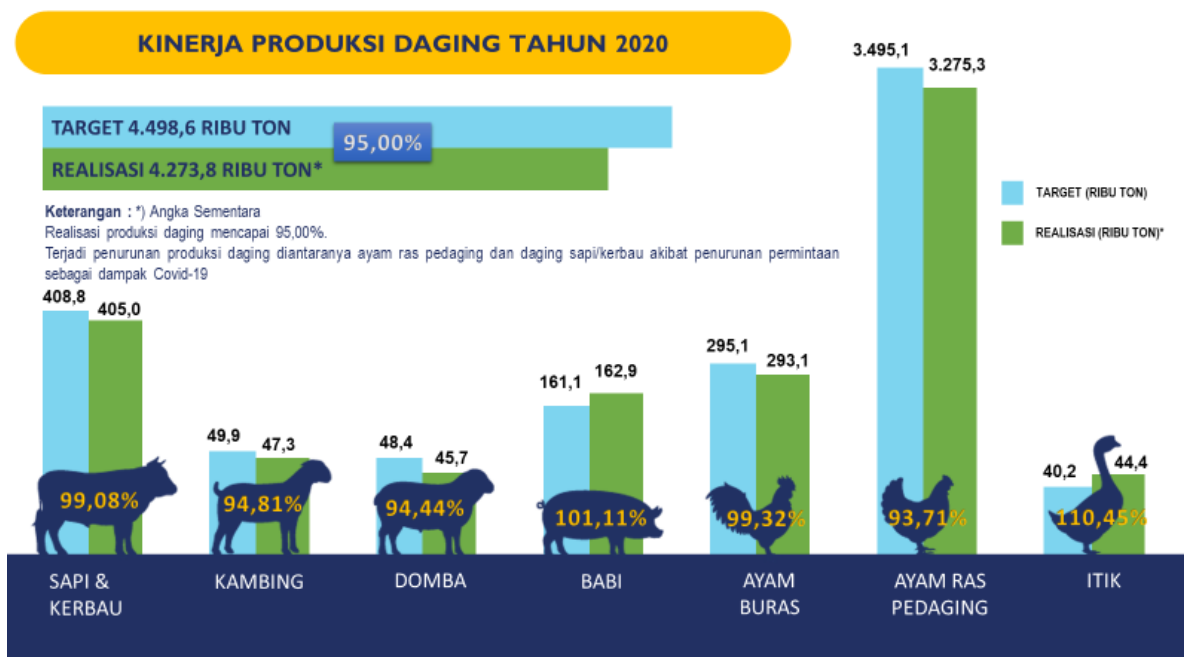
akan Dilanjutkan Menimbang pada Tahun Anggaran 2021; (iii) Melakukan tender ulang untuk Sapi Bakalan dan Indukan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## 2.3. Capaian Kinerja Teknis

### a. Produksi

Subsektor peternakan mempunyai peranan penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan hewani asal ternak melalui ketersediaan daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik dan babi), susu dan telur sebagai salah satu komoditas bahan pangan pokok. Produksi daging merupakan produksi daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik dan babi dalam bentuk *meatyield*. Pada tahun 2020, capaian produksi daging sebesar 4.273,80 ribu ton atau mencapai 95,00% dari target yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian sebesar 4.498,60 ribu ton. Kinerja produksi daging tahun 2020 dapat dilihat pada Grafik 9. Lebih lanjut, target produksi daging nasional yang telah ditetapkan oleh Bappenas pada tahun 2020 sebesar 4,10 juta ton dan capaian produksi daging tahun 2020 sebesar 4.273,80 ribu ton atau mencapai 106,85%. Pertumbuhan produksi ternak periode 2016-2020, jumlah produksi daging ayam ras pedaging mendominasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,56% per tahun, sedangkan daging sapi potong dan kerbau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,07% dan -5,87% per tahun.

**Grafik 9. Kinerja Produksi Daging Tahun 2020**



**Sumber:** Badan Pusat Statistik, 2020.

Produksi telur tahun 2020 sebesar 5.652,48 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 5,56% dari tahun sebelumnya. Sebagaimana tersaji pada Tabel 6, bahwa peningkatan produksi telur pada tahun 2020 sebesar 5,56% apabila dibandingkan dengan peningkatan produksi pada tahun 2019 yang hanya sebesar



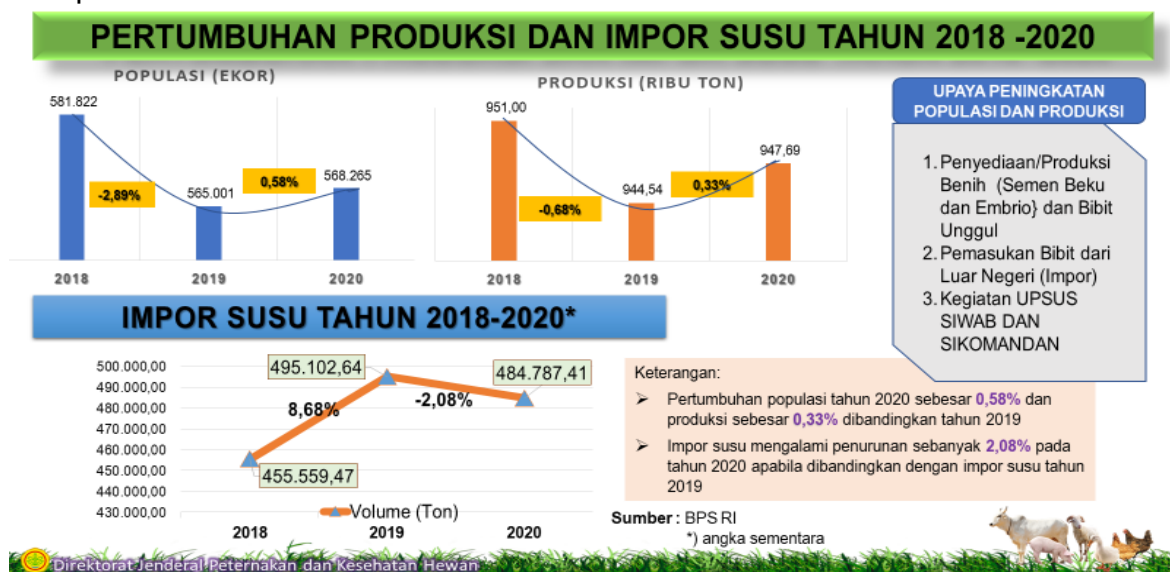
1,65%. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan produksi telur ayam buras meningkat 1,73% (250,97 ribu ton), telur ayam ras 6,12% (5.044,40 ribu ton), telur itik 1,34% (297,95 ribu ton), telur itik manila 0,81% (34,96 ribu ton), sedangkan yang mengalami penurunan adalah telur puyuh sebanyak -6,41%. Selain itu, peningkatan pertumbuhan produksi telur ini, salah satunya didorong oleh peningkatan konsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh saat pandemi Covid-19. Dimana konsumsi telur nasional naik dari sebelum Covid-19 hanya sebesar 18,16 kg/kapita/tahun menjadi 19.98 kg/kapita/tahun pada masa Covid-19.

**Tabel 6 Perkembangan Produksi Telur (Ribu Ton)**

No	Jenis Ternak	Tahun			Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020*)	
Produksi Telur					
1	Ayam Buras	212,34	246,69	250,97	1,73
2	Ayam Ras Petelur	4.688,12	4.753,38	5.044,39	6,12
3	Itik	306,54	294,01	297,95	1,34
4	Puyuh	28,96	25,86	24,21	-6,41
5	Itik Manila	31,97	34,67	34,95	0,81
	Jumlah	5.267,93	5.354,62	5.652,48	5,56
	Rata-rata pertumbuhan		1,65	5,56	

**Sumber:** Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH, 2020.

Berdasarkan data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan, produksi susu nasional tahun 2020 sebesar 947.685 ton atau mengalami kenaikan sebesar 0,33% dari pada tahun 2019 sebesar 944.537 ton. Populasi sapi perah mengalami kenaikan dari 565.001 ekor pada tahun 2019 menjadi 568.265 ekor pada tahun 2020 atau mengalami peningkatan 0,58%. Demikian juga dengan impor susu juga mengalami penurunan sebanyak 2,08% pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan impor susu pada tahun 2019.



**Grafik 10. Pertumbuhan Produksi dan Impor Susu Tahun 2018-2020**



## b. Populasi

Kinerja teknis untuk populasi beberapa komoditas peternakan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Beberapa populasi ternak besar mengalami peningkatan. Populasi sapi potong tumbuh positif sebesar 3,17% (17,47 juta ekor), sapi perah 0,53% (0,57 juta ekor), kerbau 3,97% (1,18 juta ekor), kuda 4,53% (0,4 juta ekor). Demikian juga untuk populasi ternak kecil dan unggas, dimana populasi kambing tumbuh positif sebesar 3,43% (19,10 juta ekor), babi 6,44% (9,07 juta ekor), ayam buras 2,23% (308,48 juta ekor), ayam ras petelur 6,51% (281,11 juta ekor), itik 1,68% (48,59 juta ekor), itik manila 2,22% (9,67 juta ekor). Selanjutnya, rata-rata pertumbuhan per tahun populasi ternak periode 2016-2020 terbesar yaitu ayam ras pedaging sebesar 20,27% dan ayam ras petelur sebesar 17,22%. Namun, rata-rata pertumbuhan per tahun untuk beberapa populasi mengalami pertumbuhan negatif yaitu populasi kerbau sebesar -1,00% dan kuda -1,84%.

**Tabel 7 Populasi Ternak Tahun 2016-2020**

No	Jenis Ternak	Uraian	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020*)
1	Sapi Potong	Populasi (ribu ekor)	15.997	16.429	16.433	16.930	17.467
		Pertumbuhan (%)		2,70	0,02	3,02	3,17
		Rata-rata Pertumbuhan (%)					
2	Sapi Perah	Populasi (ribu ekor)	534	540	582	565	568
		Pertumbuhan (%)		1,12	7,78	-2,92	0,53
		Rata-rata Pertumbuhan (%)					
3	Kerbau	Populasi (ribu ekor)	1.355	1.322	894	1.134	1.179
		Pertumbuhan (%)		-2,44	-32,38	26,85	3,97
		Rata-rata Pertumbuhan (%)					
4	Kuda	Populasi (ribu ekor)	424	409	378	375	392
		Pertumbuhan (%)		-3,54	-7,58	-0,79	4,53
		Rata-rata Pertumbuhan (%)					
5	Kambing	Populasi (ribu ekor)	17.862	18.208	18.306	18.463	19.096
		Pertumbuhan (%)		1,94	0,54	0,86	3,43
		Rata-rata Pertumbuhan (%)					





No	Jenis Ternak	Uraian	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020*)
6	Domba	Populasi (ribu ekor)	15.717	17.142	17.611	17.834	17.769
		Pertumbuhan (%)		9,07	2,74	1,27	-0,36
		Rata-rata Pertumbuhan (%)					3,18
7	Babi	Populasi (ribu ekor)	7.904	8.261	8.254	8.521	9.070
		Pertumbuhan (%)		4,52	-0,08	3,23	6,44
		Rata-rata Pertumbuhan (%)					3,53
8	Ayam Buras	Populasi (ribu ekor)	294.333	299.701	300.978	301.761	308.477
		Pertumbuhan (%)		1,82	0,43	0,26	2,23
		Rata-rata Pertumbuhan (%)					1,18
9	Ayam Ras Petelur	Populasi (ribu ekor)	161.364	258.844	261.933	263.918	281.108
		Pertumbuhan (%)		60,41	1,19	0,76	6,51
		Rata-rata Pertumbuhan (%)					17,22
10	Ayam Ras Pedaging	Populasi (ribu ekor)	1.632.801	2.922.636	3.137.707	3.169.805	2.970.494
		Pertumbuhan (%)		79,00	7,36	1,02	-6,29
		Rata-rata Pertumbuhan (%)					20,27
11	Itik	Populasi (ribu ekor)	47.423	49.056	50.528	47.783	48.588
		Pertumbuhan (%)		3,44	3,00	-5,43	1,68
		Rata-rata Pertumbuhan (%)					0,67
12	Itik Manila	Populasi (ribu ekor)	8.170	8.502	9.024	9.446	9.656
		Pertumbuhan (%)		4,06	6,14	4,68	2,22
		Rata-rata Pertumbuhan (%)					4,28
13	Kelinci	Populasi (ribu ekor)	1.202	1.244	1.332	1.247	1.255
		Pertumbuhan (%)		3,49	7,07	-6,38	0,64



No	Jenis Ternak	Uraian	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020*)	
		Rata-rata Pertumbuhan (%)						1,21
14	Puyuh	Populasi (ribu ekor)	14.088	14.570	14.062	14.844	14.820	
		Pertumbuhan (%)		3,42	-3,49	5,56	-0,16	
		Rata-rata Pertumbuhan (%)						1,33
15	Merpati	Populasi (ribu ekor)	2.476	2.503	2.644	2.711	2.710	
		Pertumbuhan (%)		1,09	5,63	2,53	-0,04	
		Rata-rata Pertumbuhan (%)						2,31

**Sumber :** Buku Statistik PKH 2020. **Keterangan:** \*) Angka Sementara

### c. Ekspor

Dalam era globalisasi, komoditas Subsektor Peternakan telah mampu bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional, seperti obat hewan dan produk unggas. Pada tahun 2020, Ditjen PKH memiliki target ekspor berupa 5 (lima) komoditas yaitu hewan hidup, obat hewan, produk pangan segar dan olahan, produk nonpangan, serta benih dan bibit ternak. Berdasarkan data BPS RI, nilai ekspor Subsektor Peternakan tahun 2020 sebesar US\$ 964.743 ribu atau mengalami peningkatan sebesar 29,60% dibandingkan tahun 2019 sebagaimana tersaji pada Grafik 8.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan terus mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspor dan bersaing di perdagangan global. Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan peningkatan ekspor diantaranya:

1. Produsen obat hewan dalam negeri menerapkan Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik (CPOHB). Produsen obat dalam negeri dari total 109 produsen, 65 produsen sudah mendapat Sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik (CPOHB). Kementan juga terus menyarankan produsen obat hewan agar kreatif mengembangkan produk dari bahan lokal. Menggunakan bahan lokal diharapkan dapat mengurangi impor.
2. Penerapan Sistem Kompartemen bebas penyakit Avian Influenza (AI) yang merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pertanian untuk mendorong peningkatan kualitas produk peternakan yang akan diekspor. Sejak merebaknya penyakit AI (Avian Influenza) di Indonesia pada tahun 2004, beberapa negara telah menutup impor produk unggas dari Indonesia.
3. Pada tingkat produsen, dalam upaya memberikan jaminan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan sertifikasi Nomor



Kontrol Veteriner (NKV) kepada unit usaha produk hewan yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Propinsi dibawah pembinaan pusat. Sertifikat NKV diberikan sebagai bukti terpenuhinya persyaratan higiene sanitasi unit usaha produk hewan dan. Sertifikat NKV juga menjadi salah satu persyaratan bagi unit usaha yang akan melakukan pemasukan (import) dan/atau pengeluaran (ekspor) sebagai *establishment number* (nomor registrasi unit usaha) disamping menjadi salah satu nilai tambah dan daya saing bagi produk hewan yang dihasilkan. Sampai dengan tahun 2020 telah diterbitkan sertifikat NKV untuk 2.990 unit usaha.

4. Direktorat Jenderal PKH dalam upaya akselerasi peningkatan ekspor produk peternakan membentuk Tim Percepatan Pengeluaran Benih, Bibit, Hewan, Produk Hewan, Bahan Pakan atau Pakan dan Obat Hewan dari Wilayah RI dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 4542 tahun 2019. Tim ini bertugas untuk membantu kesiapan pelaku usaha calon eksportir dan pelaku usaha eksportir dalam proses ekspor baik secara teknis maupun membantu penyiapan dokumen persyaratan teknis dan kelengkapannya yang dipersyaratkan negara tujuan, dan membantu koordinasi dengan daerah dan kementerian/lembaga terkait.
5. Dalam upaya peningkatan jumlah pelaku usaha yang siap melakukan ekspor komoditas peternakan telah dilakukan beberapa upaya :
  - a) Melakukan promosi dan misi dagang di negara potensial ekspor dengan berkoordinasi bersama K/L terkait.
  - b) Melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan ekspor bagi pelaku usaha berkoordinasi dengan direktorat teknis.
  - c) Melakukan identifikasi potensi produk siap ekspor dan identifikasi potensi Negara tujuan ekspor.

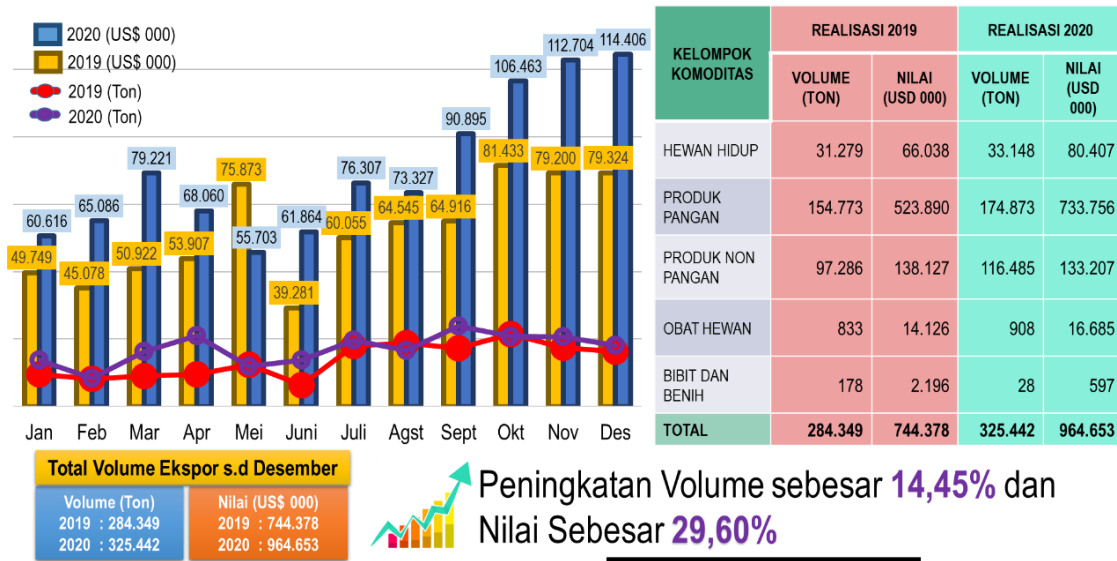
Namun demikian, dalam upaya mendorong ekspor terdapat kendala/permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua komoditas dan produk peternakan dan kesehatan hewan asal Indonesia dapat diekspor ke semua negara di dunia, karena masih ada negara yang belum melakukan proses *G to G* dengan Indonesia dalam hal perizinan pemasukan dari Indonesia.
2. Proses *G to G* membutuhkan waktu yang panjang, terutama terkait dengan status penyakit *Avian Influenza* di Indonesia yang masih bebas secara kompartemen. Beberapa negara tujuan yang ditargetkan menjadi tujuan ekspor produk daging beku unggas asal Indonesia pada tahun 2020 yakni Singapura, Jepang dan Persatuan Emirat Arab, dan Arab Saudi masih mengkaji status bebas kompartemen *Avian Influenza* Indonesia. Disamping itu, target negara tujuan ekspor daging dan ceker ayam ke Tiongkok, masih terkendala, karena pihak Tiongkok juga meminta akses pasar untuk komoditas yang sama ke pasar Indonesia.



3. Pelaku usaha calon eksportir yang belum memiliki mitra bisnis di negara tujuan ekspor sebagai calon pembeli potensial juga menjadi salah satu hambatan dalam percepatan ekspor.
4. Kondisi pandemi *Covid-19* di dunia, menyebabkan berbagai rencana pelaksanaan promosi dan misi dagang ke negara target tujuan ekspor ditunda penyelenggaraannya.

### EKSPOR KOMODITAS PETERNAKAN 2019 - 2020



**Grafik 11. Kinerja Ekspor Komoditas Peternakan Tahun 2019-2020**

#### d. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

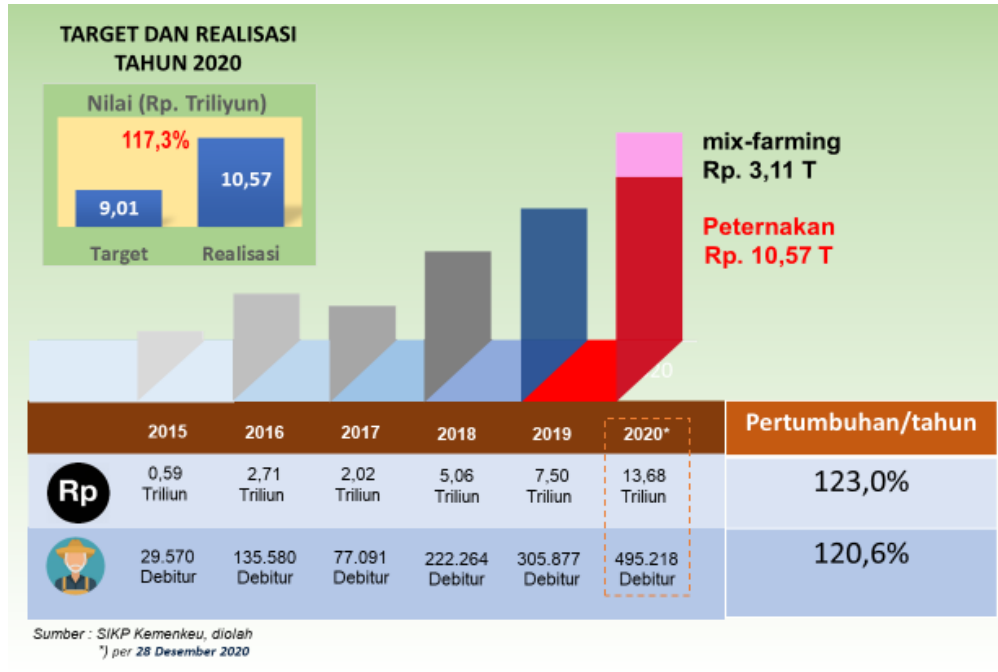
Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, strategi pemberdayaan petani dilakukan antara lain melalui penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan. Aspek pembiayaan sangat penting dalam mewujudkan akselerasi peningkatan populasi dan produksi ternak, terutama melalui peningkatan skala usaha dan efisiensi usaha. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan daya saing usaha, semakin efisien usaha maka daya saing usaha akan meningkat. Fasilitasi pembiayaan usaha peternakan terutama dilakukan melalui fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN.

Pada tahun 2020, Kementerian Pertanian menargetkan KUR untuk usaha Peternakan sebesar Rp 9.01 Triliun, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.10,57 Triliun atau mencapai 117,3% dari target. KUR tersebut diakses oleh 353.815 debitur untuk usaha produktif pembibitan dan budidaya sapi, ternak perah, kambing/domba, dan unggas.

Selain itu, berdasarkan data pada Sistem Informasi Kredit Program Kemenko Bidang Perekonomian, realisasi KUR peternakan juga terdapa pada *mix farming*, yaitu kombinasi pertanian/perkebunan dengan peternakan (*mix-farming*) sebesar



Rp. 3,11 Triliun untuk 141.403 debitur. Dimana minimal 60% dari nilai KUR mix farming untuk usaha peternakan, sehingga apabila dihitung sebagai usaha peternakan yang terintegrasi, maka kontribusi KUR terhadap usaha peternakan sebesar Rp. 13,68 triliun yang diakses oleh 495.218 debitur. Realisasi KUR dan jumlah debitur dapat dilihat pada Gambar 3



**Gambar 3. Realisasi Kredit Usaha Rakyat Subsektor Peternakan Tahun 2015-2020**

Realisasi akad kredit KUR Subsektor Peternakan pada tahun 2020 berdasarkan komoditas didominasi oleh usaha pembibitan dan budidaya sapi/kerbau Rp. 5,25 triliun (49,76%), usaha pembibitan dan budidaya unggas Rp. 2,39 Triliun (22,61%), dan usaha pembibitan dan budidaya kambing domba Rp. 1,28 Triliun (12,20%) dan sisanya untuk ternak perah dan babi. Secara rinci realisasi per komoditas dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8 Realisasi KUR Sub Sektor Peternakan Berdasarkan Komoditas Tahun 2020**

NO	KOMODITAS	JUMLAH	DEBITUR
1	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	5.256.295.328.918	185.880
2	Pembibitan dan Budidaya Domba dan Kambing Potong	1.282.217.050.854	60.051
3	Pembibitan dan Budidaya Ternak Perah	966.214.252.650	27.085
4	Pembibitan dan Budidaya Babi	670.371.822.300	23.650
5	Pembibitan dan Budidaya Unggas	2.392.627.927.467	57.149

Sumber : SIKP Kemenkeu diolah Ditjen PKH

Keterangan : \*) per 28 Desember 2020

#### 2.4. Capaian Kinerja Fungsi

Terdapat 6 (enam) kinerja fungsi PKH, yaitu : (1) Peningkatan Produksi Pakan Ternak; (2) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular; (3) Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak; (4) Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH); (5) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak; dan (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dengan uraian sebagai berikut:

##### 1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak

Kegiatan Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak ruminansia pada lokasi kegiatan UPT Pusat (B/BPTU-HPT, B/BOB, BET, dan kelompok ternak). Kegiatan pemeliharaan dan pengembangan Hijauan Pakan Ternak telah terlaksana seluas 1.069 Ha (100%) dari target tahunan sebesar 1.069 Ha. Capaian Sasaran Kegiatan ini terpenuhi dari indikator kerja penanaman dan pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas dan pengembangan HPT di UPT.

Kegiatan Pakan Olahan dan Bahan Pakan terealisasi sebesar 7.933,01 ton (101,24%) dari target tahunan sebesar 7.836 ton. Sasaran Kegiatan ini terpenuhi dari pengadaan pakan konsentrat di UPT, pengembangan pakan olahan/bahan pakan, dan pelayanan perijinan pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan (BPAT). Kegiatan Mutu dan Keamanan Pakan merupakan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pakan yang beredar di lapangan. Kegiatan Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan tahun 2020 memfasilitasi paket batuan alsin, bahan pakan, dan Gudang yang terdistribusi ke 2 (dua) kelompok Bank Pakan.



Capaian indikator kerja mutu dan keamanan pakan didukung oleh kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi pakan di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi, pengawasan mutu dan keamanan pakan di 17 Provinsi, dan layanan laboratorium pakan daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pengambilan dan pengujian sampel pakan dan telah terealisasi sebanyak 2.346 sampel (100%) dari target tahunan sebesar 2.346 sampel.

Kegiatan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) pakan pada tahun 2020 merupakan kegiatan penyusunan NSPK guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan fungsi pakan, sampai dengan Triwulan IV telah terealisasi sebanyak 5 dokumen NSPK (100%) dari target tahunan sebanyak 5 dokumen NSPK.

**Tabel 9 Capaian Kinerja Fungsi Pakan Tahun 2020**

1 Fungsi Pakan						
a	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2020	Realisasi	%
1)	Terpenuhinya pakan ternak potong sesuai kebutuhan	Jumlah pakan ternak sapi untuk produksi	Ton	26.883.537	26.883.537	100
		Jumlah pakan ternak kerbau untuk produksi	Ton	1.469.695	1.469.695	100
		Jumlah pakan ternak kambing dan domba untuk produksi	Ton	14.020.112	14.020.112	100
		Jumlah pakan ternak ayam ras pedaging untuk produksi	Ton	9.464.113	9.464.113	100
		Jumlah pakan ternak itik untuk produksi	Ton	654.948	654.948	100
		Jumlah pakan ternak babi untuk produksi	Ton	4.374.966	4.374.966	100
2)	Terpenuhinya pakan ternak perah sesuai kebutuhan	Jumlah pakan ternak perah untuk produksi susu (sapi, kerbau, kambing)	Ton	6.126.555	6.126.555	100
3)	Terpenuhinya pakan untuk ayam petelur sesuai dengan kebutuhan	Jumlah pakan ternak untuk ayam petelur	Ton	13.007.193	13.007.193	100
4)	Tersedianya sarana prasarana pakan ternak	Tingkat kemanfaatan	Indeks	85	85	100



		sarana prasarana pakan				
<b>b</b>	<b>Output Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1)	Hijauan pakan ternak	-	Ha	1.069	1.069	100
2)	Pakan olahan dan bahan pakan	-	Ton	7.836	7.933,01	101,24
3)	Mutu dan keamanan pakan	-	Sampel	2.346	2.346	100
4)	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan	-	NSPK	5	5	100

## 2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Kegiatan Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan terealisasi sebesar 150.013 sampel (153,07%) dari target tahunan 98.000 sampel. Realisasi sampel baik aktif dan pasif sampel berdasar jenis penyakit. Capaian untuk sampel aktif yaitu sebesar 98.000 sampel, dan 50.983 sampel merupakan sampel pasif yaitu kegiatan pengujian yang dilaksanakan karena adanya sampel yang masuk baik dari petugas Kesehatan hewan Dinas, peternak atau swasta. Kegiatan pengamatan dan identifikasi penyakit hewan dilaksanakan melalui surveilans tertarget yang dilaksanakan oleh UPT Veteriner yaitu Balai Besar Veteriner, Balai Veteriner, dan Pusat Veteriner Farma (untuk Penyakit Mulut dan Kuku/PMK); monitoring pelaporan tanda klinis dan sindrom penyakit hewan yang dilaporkan oleh petugas kesehatan hewan melalui iSIKHNAS; dan investigasi penyakit hewan menular oleh Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner dimana dalam kegiatan investigasi meliputi pengambilan sampel untuk tujuan peneguhan diagnosa penyakit hewan (diagnostik).

Tingginya capaian target sampel disebabkan karena peningkatan jumlah jenis pengujian penyakit yang diajukan oleh UPT perbibitan yaitu BPTU HPT Siborongborong dan BPTU HPT Indrapuri ke Balai Veteriner Medan, permintaan pengambilan sampel oleh dinas daerah Kabupaten/Kota, meningkatnya kegiatan investigasi kasus akibat adanya wabah penyakit di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara (ASF) dan DI Yogyakarta (Anthrax), surveilans yang dilakukan dalam rangka mendukung *food estate* dan luasnya layanan surveilans UPT.

Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan terealisasi sebesar 2.978.431 dosis (99,98%) dari target tahunan sebesar 2.978.886 dosis. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah penyakit Rabies, *Avian Influenza*, *Brucellosis*, Anthrax, Hog Cholera, Jembrana, *Schistosomiasis*, dan *African Swine Fever* (ASF).





Kegiatan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan terealisasi sebesar 1.664 (118,01%) dari target tahunan sebesar 1.410 sampel. Kegiatan peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan, dengan indikator kinerja (1) : Pengujian sampel obat hewan dalam rangka sertifikasi (registrasi); (2) Jumlah sampel obat hewan dalam rangka pelayanan teknis ; (3) Jumlah sampel obat hewan pengujian sewaktu-waktu (sampling di lapangan) ; (4) Jumlah sampel obat hewan kiriman dinas; (5) Jumlah sampel pengkajian obat hewan; (6) Jumlah sampel pemantauan obat hewan dengan jumlah total target sesuai Renstra.

Kegiatan Obat Hewan dan Bahan Biologik terealisasi sebesar 8.737.344 dosis (169,74%) dari target tahunan sebesar 5.147.575 dosis. Bidang pelayanan produksi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemberian pelayanan teknis produksi vaksin, antisera, diagnostika, dan bahan biologis lain untuk penyakit hewan zoonosis dan non-zoonosis. Pada tahun 2020, Bidang pelayanan produksi memproduksi vaksin sesuai dengan vaksin/antigen yang telah ditargetkan yaitu: 1) Seksi Zoonosis memproduksi vaksin Anthravet, Brucivet, Neo Rabivet, Afluvet, Antigen AI, Antigen Brucella RBT, Kit ELrSA Rabies dan serum positif dan negatif; 2) Seksi Non-Zoonosis memproduksi vaksin septivet, JD-Vet, Komavet, Antigen ND, Antigen Pullorum, Antigen Mycoplasma dan serum positif dan negatif.

Permasalahan yang ada saat ini adalah kapasitas produksi Neo Rabivet yang tidak bisa mencukupi tingginya permintaan pelanggan, namun kondisinya pada tahun 2020 bisa diatasi dengan Program Upsus Produksi Neo Rabivet. Dalam program Upsus Neo Rabivet ini, produksi Neo Rabivet tidak hanya dilakukan oleh Tim Produksi Neo Rabivet, tetapi juga dibantu oleh seluruh lini (Tim Produksi Mamalia, Tim Produksi Unggas, Tim Pengujian Mutu dan Tim Pengembangan).

Realisasi Triwulan IV sebesar 1 unit (100%) dari target 11 unit. Dalam penguatan sistem kesehatan hewan nasional, kelembagaan dan infrastruktur menjadi salah satu instrumen mayor yang harus dimiliki oleh setiap instansi. Kegiatan dalam kelembagaan veteriner yang dilaksanakan oleh UPT Pusat (BBVet dan BVet) pada tahun 2020 antara lain :

- a. Pembinaan dan koordinasi kesehatan hewan;
- b. Sistem kesehatan hewan nasional;
- c. Pengadaan dan pemeliharaan sarpras gedung, Lab Pengujian dan produksi;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia veteriner;
- e. Tenaga harian lepas kesehatan hewan;
- f. Pendampingan dan pengawalan UPSUS SIWAB;
- g. Surveilans ISO 17025.



Sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi 11 NSPK (100%) dari target 11 NSPK. NSPK tersebut terdiri dari: 1) RPP NSPK Perizinan Berusaha; 2) RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja pada Sektor Pertanian; 3) Keputusan Menteri Pertanian No. 9736/PI.500/F/09/2020 tentang Perubahan atas Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan; 4) Kiat Vetindo ASF; 5) Rancangan Pedoman Pemenuhan Indukan dan Bakalan; 6) Rancangan Pedoman Unit Usaha Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) Orientasi Ekspor dan Jenis Asal Hewan BPAH; 7) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembukaan kembali Negara terkena HPAI; 8) Rancangan Pedoman Teknis Pengawasan Keamanan Bahan Pakan Asal Hewan; 9) Rancangan Pedoman Pengawasan Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Post Border; 10) Rancangan Pedoman Audit Negara Asal dan Unit Usaha Bahan Pakan Asal Hewan *By System*; dan 11) Rancangan Permentan Pengamatan Penyakit Hewan.

Pada kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Kesehatan Hewan telah terealisasi sebanyak 9 laporan (100%) dari target tahunan sebesar 9 laporan yang terdiri dari laporan pelaksana kegiatan 5 Subdit Direktorat Kesehatan Hewan dan Tata Usaha dengan rincian diantaranya: 1) Bimbingan Teknis Auditor; 2) Kajian Penanganan Gangguan Reproduksi; 3) Pelatihan Pengawas Obat Hewan; 4) Pendampingan Kegiatan Strategis Kementan; 5) Supervisi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 6) Supervisi Sistem Informasi dan Laboratorium; 7) Evaluasi THL Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner; 8) Koordinasi dan Bimbingan Teknis Medik dan Paramedik Veteriner; dan 9) Bimbingan Teknis PPC (Petugas Pengambil Contoh) BPAH.

**Tabel 10 Capaian Kinerja Fungsi Kesehatan Hewan Tahun 2020**

2 Fungsi Kesehatan Hewan						
a	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2020	Realisasi	%
1)	Meningkatnya mutu, keamanan, dan kesehatan hewan komoditas peternakan dan kesehatan hewan	Rasio ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan hewan terhadap total ekspor ternak pernegara tujuan (alasan penolakan : kesehatan hewan)	%	0	0	100,00
		Rasio ekspor non ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan kesehatan	%	0	0	100,00



		hewan terhadap total ekspor non ternak pernegara tujuan (alasan penolakan : kesehatan hewan)				
		Rasio ekspor obat hewan yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan terhadap total ekspor obat hewan per negara tujuan (alasan penolakan : mutu dan keamanan)	%	0	0	100,00
2)	Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis	Rasio ternak sapi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak sapi	%	2,74	2,65	103,3
		Rasio ternak kerbau yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kerbau	%	3,21	3,12	102,8
		Rasio ternak kambing yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kambing	%	9,61	9,52	100,9
		Rasio ternak domba yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak domba	%	8,53	8,44	101,1
		Rasio ternak ayam yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam buras	%	25,51	25,51	100
		Rasio ternak ayam yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam pedaging	%	4,42	4,42	100
		Rasio ternak itik yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak itik	%	9,01	9,01	100
		Rasio ternak babi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak babi	%	19,53	19,53	100



3)	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Rasio wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	%	80	80,01	100
4)	Meningkatnya kesehatan ternak perah	Rasio ternak perah yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak perah	%	3,79	3,70	102,4
5)	Meningkatnya kesehatan ayam petelur	Rasio ayam petelur yang mati karena penyakit terhadap total populasi ayam petelur	%	4,24	4,24	100
6)	Tersedianya sarana prasarana kesehatan hewan	Tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan hewan	%	91	91	100
<b>b</b>	<b>Output Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1)	Pengamatan dan identifikasi penyakit hewan	-	Sampel	98.000	150.013	153,07
2)	Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan	-	Dosis	2.978.886	2.978.431	99,98
3)	Pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan	-	Sampel	1.410	1.664	118,01
4)	Obat hewan dan bahan biologik	-	Dosis	5.147.575	8.737.344	169,74
5)	Kelembagaan Veteriner	-	Unit	11	11	100
6)	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan	-	Dokumen	7	7	100
7)	Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Kesehatan Hewan	-	Laporan	9	9	100

### 3. Perbibitan dan Produksi Ternak

Realisasi produksi benih ternak sebanyak 6.445.035 dosis atau 121,16% dari target 4.940.800 dosis, yang terdiri dari produksi embrio di BET Cipelang 1.006 embrio dari target 900 embrio, semen beku BIB Lembang 2.657.733 dosis dari target 2.325.000 dosis, dan semen beku BBIB Singosari dengan produksi 3.087.434 dosis dari target 3.100.000 dosis. Selain produksi benih di 2 balai nasional, pengembangan benih ternak unggul dilakukan juga oleh BIBD (BIBD Tuah Sakato Sumatera Barat, BIBD Riau, BIBD Bengkulu,



UPTD IB Ciamis, BIBD Unggara, UPT BIBD Denpasar, UPTD BPPTDK Yogyakarta, BIBD Banjar Baru Kalimantan Selatan, BIB Pucak Sulawesi Selatan, BIBD Banyu Mulok NTB).

Realisasi produksi bibit ternak 810.027 ekor (107,39%) dari target tahunan 754.280 ekor. Kegiatan ini mendukung tercapainya target betin produktif yang diajukan dalam mendukung terpenuhinya bibit ternak sesuai kebutuhan yaitu pengembangan bibit ternak unggul. Kegiatan ini dilaksanakan di masing-masing UPT Lingkup Ditjen PKH.

Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2020 sebanyak 21.100 ekor (100%) dari target tahunan 21.100 ekor. Kegiatan ini merupakan kegiatan fasilitasi ternak (sapi potong, kambing/domba) di kelompok. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan regular pengembangan ternak ruminansia potong dan kegiatan Super Prioritas 1.000 Desa Sapi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan regular pengembangan ternak ruminansia potong berupa pengadaan ternak sebanyak 5.100 ekor sapi di 22 Provinsi dan kambing/domba 11.000 ekor di 33 Provinsi.
- b. Kegiatan Super Prioritas 1.000 Desa Sapi di Provinsi Lampung (sapi indukan 150 ekor, sapi bakalan 73 ekor), Jawa Timur (sapi indukan 68 ekor, sapi bakalan 127 ekor), NTB (sapi bakalan 110 ekor), dan Sulsel (sapi indukan 326 ekor).

Kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak pada Triwulan IV tahun 2020 telah teralisasi sebanyak 36.025 ekor (100%) dari target tahunan sebanyak 36.025 ekor. Adapun rincian dari realisasi diantaranya: a) Pengembangan ayam lokal di kelompok dengan target ayam lokal 26.500 ekor; b) Pengembangan ayam lokal di UPTD dengan target 8.500 ekor; c) Pengembangan babi 1.025 ekor; dan d) Pengembangan itik 7.650 ekor. Pengembangan ayam lokal di kelompok terealisasi di 7 Provinsi dan 19 Kab/Kota, pengembangan ayam lokal di UPTD teralisasi di 4 Provinsi (UPTD Pasaman, UPTD Kampar Riau, UPTD Balai Benih Pertanian, dan UPTD Gorontalo). Pengembangan itik untuk pendukung pengembangan *Food Estate* di Kalimantan tengah di kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau tercapai 100% dari target dan Pengembangan babi di 5 Provinsi dan 16 Kab/Kota tercapai 100%.

Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak telah terealisasi 6 NSPK (100%) dari target tahunan 6 NSPK. Produksi telur ayam ras pada Triwulan IV tahun 2020 mencapai 5.044.395 ton (105,20%) dari target sebesar 4.795.165 ton. Produksi susu pada Triwulan IV sudah mencapai 947.685 ton (97,89%) dari target tahunan sebesar 968.150 ton.



Data untuk Produksi Susu merupakan data yang memperhitungkan data kelahiran yang dilaporkan melalui ISIKHNAS.

**Tabel 11 Capaian Kinerja Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak Tahun 2020**

3 Fungsi Perbibitan dan Produksi						
a	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2020	Realisasi	%
1)	Meningkatnya mutu produk peternakan untuk komoditas ekspor	Rasio Ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan (alasan penolakan: mutu ternak)	%	20	0	200
2)	Terpenuhinya populasi ternak sesuai kebutuhan	Jumlah populasi ternak sapi potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	2.142.648	2.508.440	117,07
		Jumlah populasi ternak kerbau potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	130.162	128.375	98,63
		Jumlah populasi ternak kambing potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	3.977.698	4.776.933	120,09
		Jumlah populasi ternak domba potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	4.629.869	4.635.078	100,11
		Jumlah populasi ternak ayam sesuai kebutuhan produksi	Ekor	3.004.480.237	2.790.665.067	92,88
		Jumlah populasi ternak itik sesuai kebutuhan produksi	Ekor	30.770.385	37.610.440	122,23
		Jumlah populasi ternak babi potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	3.995.403	4.083.060	102,19
		3)	Terpenuhinya bibit ternak sesuai kebutuhan	Jumlah betina produktif ternak sapi potong	Ekor	2.657.090
Jumlah betina produktif ternak kerbau potong	Ekor			372.372	383.869	103,09



		Jumlah betina produktif ternak kambing potong	Ekor	3.672.382	2.893.287	78,79
		Jumlah betina produktif ternak domba potong	Ekor	3.606.858	2.733.176	75,78
		Jumlah betina produktif ternak ayam	Ekor	17.350.891	25.407.257	146,43
		Jumlah betina produktif ternak itik	Ekor	190.883	197.564	103,50
		Jumlah betina produktif ternak babi potong	Ekor	463.130	475.856	102,75
4)	Tersedianya standar benih ternak dan bibit ternak sesuai kebutuhan	Rasio standar benih ternak yang dihasilkan terhadap total standar benih ternak yang direncanakan	%	90	100	111,11
		Rasio standar bibit ternak yang dihasilkan terhadap total standar bibit ternak yang direncanakan	%	90	100	111,11
5)	Meningkatnya ketersediaan benih dan bibit bermutu	Rasio benih dan bibit yang bersertifikat terhadap total benih dan bibit yang diajukan	%	70	92	131,43
6)	Meningkatnya produksi susu untuk memenuhi kebutuhan protein nasional	Produksi susu	Ton	968.150	947.685	97,89
		Jumlah betina produktif ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu	Ekor	308.160	304.022	98,66
7)	Meningkatnya produksi telur untuk memenuhi kebutuhan protein nasional	Produksi telur	Ton	4.795.165	5.044.395	105,20
		Jumlah populasi ternak ayam ras petelur sesuai kebutuhan produksi telur	Ekor	267.913.341	281.108.401	104,93
8)	Tersedianya sarana prasarana perbibitan dan produksi ternak	Tingkat kemanfaatan sarana prasarana	%	90	100	111,11



b	Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2020	Realisasi	%
1)	Optimalisasi Reproduksi	-	Akseptor	3.000.000	3.634.738	121,16
2)	Benih Ternak Unggul	-	Dosis	4.940.800	6.445.035	130,45
3)	Bibit Ternak Unggul	-	Ekor	754.280	810.027	107,39
4)	Pengembangan Ternak Ruminansia Potong	-	Ekor	21.100	21.100	100
5)	Pengembangan Ternak Ruminansia Perah	-	Ekor	1	1	100
6)	Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak	-	Ekor	36.025	36.025	100
7)	Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	-	NSPK	6	6	100

#### 4. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

Ditjen PKH memfasilitasi kegiatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH yang terealisasi sebanyak 168 unit usaha (129,2%) dari target tahun 2020 sebanyak 130 unit. Kegiatan ini merupakan pembinaan NKV (Nomor Kontrol Veteriner) unit usaha produk hewan pada 28 Provinsi. Pada tahun 2020 juga terdapat capaian sertifikasi NKV diluar target yang bersumber dana APBD sebanyak 189 unit usaha sehingga total sertifikasi NKV pada tahun 2020 sebanyak 357 unit usaha. Sehingga total unit usaha ber-NKV sampai dengan tahun 2020 tercatat sebanyak 2.990 unit usaha dari data tahun 2019 yaitu 2.633 unit usaha, hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 113,55% dari tahun 2019.

Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk terealisasi sebanyak 18.900 sampel dari target tahunan 16.630 sampel (113,6%). *Outcome* yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah adanya peningkatan jumlah produk hewan (jumlah sampel produk hewan) yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan. Pengoleksian dan pengujian sampel dilakukan oleh 9 UPTP meliputi BPMSPH, BBVET Wates, BBVET Denpasar, BBVET Maros, BVET Medan, BVET Bukititnggi, BVET Lampung, BVET Subang dan BVET Banjarbaru serta 34 Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Dari total sampel produk hewan yang dikoleksi, sampel pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan mencapai 86,6% dari target 81,5%.

Kegiatan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif telah terealisasi di 33 lokasi dari target tahunan 33 lokasi (100%) dengan total betina produktif yang





dapat diselamatkan dari pemotongan sebanyak 7.733 ekor dari target tahunan sebanyak 9.351 ekor (117,30). Realisasi pemotongan betina produktif pada Triwulan IV tahun 2020 ini sebanyak 7.733 ekor atau terdapat penurunan pemotongan sebesar 20,61% jika dibandingkan dengan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif pada rentang waktu yang sama pada Tahun 2019 yaitu sebesar 9.741 ekor.

Pengendalian pemotongan betina produktif menunjukkan keberhasilan sejak tahun 2017. Dalam kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif juga dilakukan penolakan pemotongan betina produktif di Rumah Potong Hewan. Berdasarkan data iSIKHNAS, penolakan pemotongan betina produktif di RPH sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2020 sebanyak 1.100 ekor dengan alasan penolakan yaitu bunting dan masih produktif. Meskipun secara nasional pemotongan betina produktif tahun 2020 turun sebesar 20,61% namun di 13 Provinsi (Aceh, Bengkulu, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara) pemotongan betina produktif meningkat. Pemotongan betina produktif turun lebih dari 4% di 14 Provinsi (Bali, DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara), tetap di 2 Provinsi (Kalimantan Timur dan Papua) dan tidak ada pemotongan betina produktif di 4 Provinsi (Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Tengah, dan Lampung).

Kegiatan Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 telah terealisasi sebanyak 4 unit (100%) dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 4 unit. Realisasi ini terlaksana di Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH), Balai Veteriner Wates, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan (kegiatan berupa fasilitasi peralatan RPH-R Kota Makassar).

Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner telah disusun sebanyak 6 dokumen dari target tahun 2020 sebanyak 6 dokumen (100%). Dokumen NSPK yang telah disusun yaitu: 1) Surat Edaran Dirjen PKH No.0534/SE/TU.020/F/04/2020 tentang Langkah Aman Pencegahan Covid-19 bagi Unit Usaha Pangan Asal Hewan; Prosedur Pengaduan Masyarakat berbasis Aplikasi Digital (Kolom Laporan Masyarakat/Kolom Kesmavet), Surat Edaran Dirjen PKH No.04043/PK.420/F/12/2020 tentang Penjaminan Penyediaan Produk Hewan ASUH menjelang dan/atau pada Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021; 2) Rancangan Permentan tentang Pemasukan dan Pengeluaran



Produk Hewan Pangan dan Non Pangan; Rancangan Permentan Registrasi Produk Hewan; Kuesioner Negara dan Unit Usaha Pemasukan Produk Hewan; Draft Animal Health Requirements for Heat-Processed Meat and Meat Products from Cloven- Hoofed Animals to be exported from Republic of Indonesia to Japan; RSNI Sarang Burung Walet; RSNI Rumah Potong Hewan Unggas; RSNI Kesrawan; 3) Permentan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan; Draft Pedoman Rumah Potong Hewan Unggas (termasuk Desain RPHU skala 500-1000 ekor/hari); 4) Draft Petunjuk Teknis Pembunuhan Unggas yang Memenuhi Aspek Kesejahteraan Hewan; dan Draft Petunjuk Teknis Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Moda Angkutan Darat; 5) Surat Edaran Dirjen PKH Nomor 0008/SE/PK.320/F/06/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Non Alam *Corona Virus Disease* (Covid-19); Pedoman Teknis Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem di RPH-R; dan 6) Draft MoU Lanjutan Kerjasama Kementan dan POLRI dalam Pengendalian Pematangan Betina Produktif.

Tabel 12 Capaian Kinerja Fungsi Kesmavet Tahun 2020

4 Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner						
a	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2020	Realisasi	%
1)	Meningkatnya produk hewan pangan yang diterima negara tujuan ekspor terkait alasan mutu dan keamanan produk	Rasio ekspor produk hewan pangan dan non pangan yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan produk terhadap total ekspor produk hasil peternakan per negara tujuan (alasan penolakan: mutu dan keamanan produk)	%	0	0	100
2)	Meningkatnya daging yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	Rasio penjaminan daging ruminansia yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak ruminansia yang dipotong	%	17,5	19,7	112,6
		Rasio penjaminan daging unggas yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak unggas yang dipotong	%	51,3	54,3	105,8



		Rasio penjaminan daging babi yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak babi yang dipotong	%	1,7	3,4	200
3)	Tersedianya sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner	%	85	100	85
4)	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%	81,5	86,6	106,3
5)	Terkendalinya kasus zoonosis kepada manusia	Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	Kasus	122	67	145,1
6)	Meningkatnya susu dan telur yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat	Rasio produk susu yang berstatus sehat terhadap total produk susu yang dihasilkan	%	88,2	85,2	96,6
		Rasio produk telur yang berstatus sehat terhadap produk telur yang dihasilkan	%	95,2	98	102,9
<b>b</b>	<b>Output Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1)	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	-	Unit usaha	130	168	129,2
2)	Pengawasan mutu dan keamanan produk	-	Sampel	16.630	18.900	113,6
3)	Pengendalian Pemotongan betina produktif	-	Lokasi	33	33	100
			Ekor	9.351	7.733	117,30
4)	Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan	-	Unit	4	4	100
5)	Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	Dokumen	6	6	100



## 5. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

Kegiatan pengembangan pengolahan pangan dan non pangan sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 telah terealisasi sebanyak 32 unit (100%) dari target tahunan yaitu sebanyak 32 unit. Adapun capaian kegiatan meliputi:

- a) Fasilitasi sarana pengolahan unggas dan aneka ternak di 1 (satu) UPH ditunjukkan dengan telah siap sertifikasi MD (sudah e-registrasi).
- b) Fasilitasi peningkatan mutu produk olahan di 3 (tiga) UPH ditunjukkan dengan telah siap sertifikasi MD (sudah e-registrasi).
- c) Fasilitasi sertifikasi dan ijin edar pupuk organik di 28 (dua puluh delapan) UPH yang terdiri dari:
  - 1) Program regular di 3 (tiga) UPH ditunjukkan dengan telah siap sertifikasi organik.
  - 2) Program ABT 1.000 Desa Sapi di 25 (dua puluh lima) kelompok peternak, ditunjukkan dengan unit biogas dan pengolahan pupuk cair telah terinstalasi dengan kandang.

Sarana pemasaran peternakan yang dialokasikan berupa fasilitasi sarana tata niaga yang di alokasikan di NTT sebanyak 1 unit. Pelaksanaan fasilitasi tata niaga peternakan di Provinsi NTT secara fisik telah dilaksanakan 100% yakni berupa akses jalan *holding ground* dan instalasi air yang berlokasi di Desa Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Kegiatan Kelembagaan dan Usaha Peternakan dengan target tahun 2020 sebanyak 113 Lokasi baru dan telah terealisasi 113 lokasi (100%). Kegiatan ini direalisasikan untuk pengolahan hasil peternakan (pengembangan Sistem Peternakan Organik Komoditas Peternakan yaitu pangan dan pupuk, *Branding Special Bali Beef*, dan Pemutakhiran *Database* Pengolahan) dan penguatan kelembagaan dan pembiayaan peternakan (Pengembangan Kemitraan Usaha Peternakan, Fasilitasi Pendampingan Usaha Peternakan, Kawasan Peternakan Berbasis Korporasi Peternak, Pengembangan 1.000 Desa Sapi, dan Asuransi Usaha Ternak Sapi).

Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan pada tahun 2020 ditargetkan 21 dokumen. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 telah terealisasi seluruhnya sebanyak 100%. Kegiatan NSPK bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan NSPK termasuk kebijakan di bidang pengolahan, investasi, dan pengembangan usaha, dan pemasaran.



Pengelolaan Informasi Pemasaran pada tahun 2020 ditargetkan 15 lokasi dan telah terealisasi seluruhnya sebanyak 15 lokasi (100%). Kegiatan ini dilakukan untuk Pengelolaan Informasi Pemasaran dan Koordinasi Tataniaga Ternak dan Hasil Ternak. Pada tahun 2020 dilakukan fasilitasi Pelayanan Informasi Pasar (PIP) di 34 Provinsi dan 174 Kabupaten/Kota melalui dana APBN. Dengan demikian terdapat 208 petugas PIP yang difasilitasi melalui dana APBN. Pelayanan Informasi Pasar dilakukan di 34 Provinsi, dengan hasil 34 informasi harga pasar untuk komoditi peternakan di seluruh Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Sulsel, Sulbar, Sulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Kaltim, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

**Tabel 13 Capaian Kinerja Fungsi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Tahun 2020**

<b>5 Fungsi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak</b>						
<b>a</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1)	Meningkatnya daya saing komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai ekspor hewan hidup	US\$ (000)	75.944	80.478	105,97
		Nilai ekspor produk pangan segar dan olahan	US\$ (000)	602.474	733.762	121,79
		Nilai ekspor produk non pangan	US\$ (000)	158.846	133.219	83,87
		Nilai ekspor obat hewan	US\$ (000)	16.245	16.684	102,70
		Nilai ekspor benih dan bibit ternak	US\$ (000)	2.526	597	23,63
		Pertumbuhan unit usaha peternakan	%	1,88	3,01	160
2)	Tersedianya Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	%	85	88,88	104,57
<b>b</b>	<b>Output Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1)	Pengembangan pengolahan pangan dan non pangan	-	Unit	32	32	100
2)	Pengembangan Pemasaran Peternakan	-	Unit	1	1	100
3)	Kelembagaan dan usaha peternakan	-	Lokasi	113	113	100
4)	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria	-	NSPK	21	21	100

	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan					
5)	Pengelolaan Informasi Pemasaran	-	Lokasi	15	15	100

#### 6. Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKH

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Layanan Perkantoran masing-masing tercapai 100% dalam capaian Triwulan IV, mengingat semua kegiatan merupakan kegiatan rutin terkait manajemen dan layanan yang dilaksanakan setiap bulan. Layanan Sarana dan Prasarana Internal meliputi pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi, pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, dan pembangunan/renovasi gedung dan bangunan.

Layanan Dukungan Manajemen Satker meliputi penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, pengelolaan kepegawaian, dan pelayanan umum, pelayanan rumah tangga, dan perlengkapan di masing-masing Satker Ditjen PKH. Sedangkan Layanan Perkantoran meliputi laporan gaji, tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor.

**Tabel 14 Capaian Kinerja Fungsi Kesekretariatan Tahun 2020**

6 Fungsi Kesekretariatan						
a	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2020	Realisasi	%
1)	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	32,3	32,3	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Skala Likert (1-4)	3,37	3,48	103,26
2)	Terkelolanya anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	88,25	91,23	103,38
b	Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2020	Realisasi	%
1)	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	-	Layanan	1	1	100,00



2)	Layanan Dukungan Manajemen Satker	-	Layanan	1	1	100,00
3)	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	Layanan	1	1	100,00
4)	Layanan Perkantoran	-	Layanan	1	1	100,00

## 2.5. Capaian Kinerja Anggaran

Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 sebesar Rp 1.299.595.278.000,-. Adapun kronologi revisi perubahan pagu anggaran Ditjen PKH pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Revisi pertama merupakan gugur bintang untuk membuka blokir DIPA sebesar Rp. 2.022.297.255.000,- pada tanggal 13 Januari 2020.
- b. Revisi ke dua merupakan perubahan penghematan sebagai tindak berdasarkan Surat Sekjen Nomor B-1307/RC.110/A/04/2020 tentang Perubahan Penghematan Anggaran Kementerian Pertanian TA 2020 tanggal 21 April 2020 akibat adanya pandemi *Covid-19*. Penghematan sebesar Rp. 802.537.466.000,- menyebabkan perubahan pagu menjadi Rp. 1.219.759.789.000,-.
- c. Revisi yang ke tiga masih merupakan penghematan sebagai bentuk tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI. Penghematan sebesar Rp 66 milyar ini menyebabkan perubahan pagu menjadi Rp. 1.153.013.024.000,-.
- d. Revisi ke empat adalah penambahan pagu ABT sebesar Rp 140.430.000.000,- sehingga pagu total berubah menjadi Rp. 1.239.443.024.000,-.
- e. Revisi ke lima adalah optimalisasi dan penambahan pagu PNBPN sebesar Rp. 3.704.992.000,- sehingga terjadi perubahan pagu total menjadi Rp. 1.297.148.016.000,-.
- f. Revisi ke enam dan ke tujuh merupakan optimalisasi sisa kontraktual dimana tidak menyebabkan perubahan total pagu, sehingga pagu anggaran Ditjen PKH tetap sebesar Rp. 1.297.148.016.000,-.
- g. Revisi ke delapan adalah perubahan anggaran pendapatan dan belanja yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di mana dalam revisi terjadi penambahan pagu PNBPN di 7 satker UPT sebesar Rp. 2.447.262.000,- sehingga pagu total menjadi Rp. 1.299.595.278.000,-.

Kronologis revisi Anggaran Ditjen PKH Tahun 2020 secara lengkap disajikan pada gambar berikut.

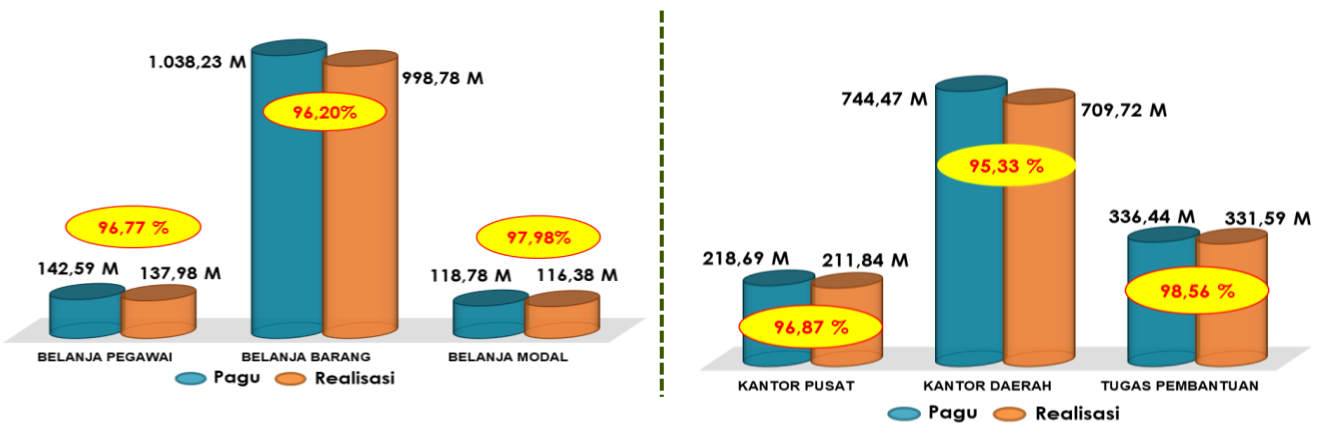




Gambar 4. Kronologi Perubahan Anggaran Tahun 2020

Dari total anggaran sebesar Rp 1,299 triliun, sebesar 16,83% (Rp 218 milyar) anggaran dialokasikan di Kantor Pusat, untuk Kantor Daerah sebesar 57,28% (Rp 744 milyar) dan TP Provinsi sebesar 25,89% (Rp 336 milyar). Anggaran tersebut dialokasikan di 57 satker, terdiri dari 1 Kantor pusat, 22 Kantor Daerah (UPT) dan 34 satker TP Provinsi. Serapan anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun anggaran 2020 adalah sebesar 96,43% atau Rp 1,253 triliun dari total alokasi anggaran sebesar Rp 1,299 triliun.

Realisasi serapan anggaran berdasarkan jenis kewenangan adalah: (i) Kantor Pusat sebesar 96,87% atau Rp 211,844 miliar dari anggaran sebesar Rp.218,685 miliar, (ii) Kantor Daerah sebesar 95,33% atau Rp 709,72 miliar dari anggaran sebesar Rp 744,473 miliar, dan (iii) Tugas Pembantuan Provinsi sebesar 98,56% atau Rp 331,585 miliar dari anggaran sebesar Rp 336,437 miliar.



Sumber: Aplikasi OM-SPAN per 30 Januari 2021

Grafik 12. Realisasi anggaran per Jenis Belanja dan Kewenangan

Realisasi serapan anggaran berdasarkan jenis belanja adalah (i) Belanja Pegawai sebesar 96,77% atau Rp 137,979 miliar,- dari pagu anggaran Rp.142,59 miliar,- (ii) Belanja Barang sebesar 96,20% atau Rp 998,78 dari pagu anggaran Rp 1.038,23 miliar,- (iii) Belanja Modal sebesar 97,98% atau Rp 116,38 miliar,- dari pagu anggaran Rp.118,78 miliar.





Realisasi serapan anggaran berdasarkan kegiatan utama adalah: (i) Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar 94,77% atau Rp 587,029 miliar,- dari pagu anggaran Rp 619,452 miliar,- (ii) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal 98,77% atau Rp 76,140 miliar,- dari pagu anggaran Rp.77,088 miliar,- (iii) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 98,33% atau Rp 168,740 miliar,- dari pagu anggaran Rp 171,602 miliar,- (iv) Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) 98,54% atau Rp.29,925 miliar,- dari pagu anggaran Rp 30,369 miliar,- (v) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak 97,34% atau Rp 25,140 miliar,- dari pagu anggaran sebesar Rp 25,828 miliar,- dan (vi) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 97,58% atau Rp 366,168 miliar,- dari pagu anggaran Rp 375,253 miliar.

**Tabel 15 Realisasi Anggaran per Kegiatan**

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak	77.088.165.000	76.140.553.199	98,77
2	1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	171.602.744.000	168.740.124.222	98,33
3	1785 Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	619.452.682.000	587.029.447.082	94,77
4	1786 Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH	30.369.127.000	29.925.002.129	98,54
5	1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	375.253.827.000	366.168.947.007	97,58
6	5891 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	25.828.733.000	25.140.814.065	97,34
<b>Total</b>		<b>1.299.595.278.000</b>	<b>1.253.144.887.704</b>	<b>96,43</b>

## 2.6. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya yang diraih oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020 diantaranya:



1. Ditjen PKH meraih penghargaan Peringkat I Unit Kerja Informatif Tahun 2020 lingkup Kementerian Pertanian.



**Gambar 5.** Penghargaan Unit Kerja Informatif Tahun 2020 Lingkup Kementerian Pertanian

2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yakni Balai Embrio Ternak (BET) dan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) mendapatkan peringkat I dan III Unit Kerja Informatif Tingkat Kementerian Pertanian Tahun 2020. Selain itu Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari terpilih sebagai Unit Kerja Eselon II dengan Sarana dan Prasarana Informasi Publik Terbaik



**Gambar 6.** Penghargaan Unit Kerja Informatif Tahun 2020 Lingkup Kementerian Pertanian



3. Pusvetma yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mendapatkan penghargaan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).



**Gambar 7.** Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

4. Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mendapatkan penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon II dengan Sarana dan Prasarana IP Terbaik dan penghargaan sebagai UPT berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) lingkup Kementerian Pertanian.



**Gambar 8.** Penghargaan UPT Berpredikat WBBM Nasional



### III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2021

#### 3.1. Program dan Target Tahun 2021

Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024 Revisi I, dengan adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan kerangka kebijakan dan strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang telah ditetapkan dalam menjalankan Tugas dan Fungsi, disusunlah program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021 yaitu: (a) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan yang Berkualitas; (b) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (c) Dukungan Manajemen dengan sasaran: (a) Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal Ternak; (b) Meningkatnya Daya Saing Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan; (c) Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Asal Ternak; (d) Tersedianya Sarana Prasarana Peternakan.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian pada tahun 2020-2024, diperlukan penetapan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan pendanaan yang memadai untuk menjalankan kebijakan, strategi program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung Program Prioritas Nasional (PN1) berupa Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Program Prioritas (PP) yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3). Program Prioritas tersebut memiliki Target Produksi Daging dan Target Ekspor.

Target produksi daging pada tahun 2021 sebesar 4,54 juta ton yang terdiri dari 7 (tujuh) komoditas: (1) Daging Sapi: 403,31 Ribu Ton; (2) Daging Kerbau: 22,67 Ribu Ton; (3) Daging Kambing: 50,47 Ribu Ton; (4) Daging Domba: 48,97 Ribu Ton; (5) Daging Ayam: 3.807,85 Ribu Ton; (6) Daging Itik: 40,61 Ribu Ton; (7) Daging Babi: 162,78 Ribu Ton. Selanjutnya, target ekspor subsektor peternakan pada tahun 2021 sebesar 376,052 ton yang terdiri dari 5 (lima) komoditas ekspor: (1) Hewan Hidup: 41.367 ton; (2) Produk Pangan Segar dan Olahahan: 204.687 Ton; (3) Produk Non Pangan: 128.661 Ton; (4) Obat Hewan: 1.102 Ton; (5) Bibit dan Benih: 235 Ton. Pencapaian target produksi daging dan target ekspor subsektor peternakan didukung oleh potensi jumlah Rumah Tangga Peternakan 13,56 juta orang (Sutas, 2018).

#### 3.2. Alokasi Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 2.132.854.524.000,-. Alokasi anggaran berdasarkan Program adalah sebagai berikut: (i) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri: Rp 65,48 Milyar (3%); (ii)



Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas: Rp 1,71 Trilyun (80%); dan (iii) Program Dukungan Manajemen: 352,92 Milyar (17%).

Selanjutnya, alokasi anggaran berdasarkan Kewenangan adalah sebagai berikut : (i) Kantor Pusat: Rp 267,66 Milyar (13%); (ii) Kantor Daerah (UPT): Rp 1,36 Trilyun (64%); dan Tugas Pembantuan (Provinsi): Rp 500,40M (23%). Alokasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikut: (i) Belanja Pegawai: Rp 144,09 Milyar (7%); (ii) Belanja Barang: Rp 1,73 Trilyun (81%); (iii) Belanja Modal: Rp 259,61 Milyar.



**Grafik 13.** Alokasi Anggaran Ditjen Peternakan dan Keswan T.A. 2021

Selanjutnya, alokasi anggaran berdasarkan Kewenangan adalah sebagai berikut : (i) Kantor Pusat: Rp 267,66 Milyar (13%); (ii) Kantor Daerah (UPT): Rp 1,36 Trilyun (64%); dan Tugas Pembantuan (Provinsi): Rp 500,40M (23%). Alokasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikut: (i) Belanja Pegawai: Rp 144,09 Milyar (7%); (ii) Belanja Barang: Rp 1,73 Trilyun (81%); (iii) Belanja Modal: Rp 259,61 Milyar.

Alokasi anggaran berdasarkan Kegiatan adalah sebagai berikut: (i) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak: Rp 65.483.500.000 (3%); (ii) Peningkatan Produksi Ternak: Rp 155.507.500.000 (7%); (iii) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan: Rp 306.265.616.000 (14%); (iv) Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak; Rp 1.175.866.446.000 (55%); (v) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner: Rp 76.816.343.000 (4%); dan (vi) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan: Rp 352.915.119.000 (17%).



## PAGU ALOKASI ANGGARAN PER KEGIATAN T.A. 2021

KEGIATAN		ANGGARAN	%
018.06	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.132.854.524.000	
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	65.483.500.000	3
1783	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	155.507.500.000	7
1784	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	306.265.616.000	14
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	1.175.866.446.000	55
1786	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	76.816.343.000	4
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	352.915.119.000	17

Tabel 16 Alokasi Anggaran per Kegiatan T.A. 2021

Guna mendukung Tugas dan Fungsi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal produksi dan ketersediaan bahan pangan asal hewan, maka dialokasikan anggaran untuk Bantuan Ternak kepada Masyarakat. Adapun rencana anggaran Bantuan Ternak kepada Masyarakat pada T.A. 2021 adalah sebagai berikut:

## ALOKASI ANGGARAN BANPER TERNAK 2021

Pengadaan Ternak UPT		
Rincian	Vol (ekor)	Jumlah (Rp)
<b>Sapi Potong</b>	<b>8.300</b>	<b>132.800.000.000</b>
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG	2.500	40.000.000.000
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR	1.300	20.800.000.000
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA	2.000	32.000.000.000
BALAI VETERINER SUBANG	1.000	16.000.000.000
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN	1.500	24.000.000.000
<b>Indukan/Bakalan Impor</b>	<b>7.000</b>	<b>209.475.000.000</b>
BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL III BANDAR LAMPUNG	2.000	58.190.000.000
BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURADE	N 2.000	64.000.000.000
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI	3.000	87.285.000.000
<b>Ayam Lokal</b>	<b>2.250.000</b>	<b>110.199.000.000</b>
Pusat Veteriner Farma Surabaya	500.000	19.000.000.000
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS	300.000	36.099.000.000
BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA	800.000	30.400.000.000
BALAI VETERINER BANJARBARU	650.000	24.700.000.000
<b>Itik</b>	<b>500.000</b>	<b>71.327.000.000</b>
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI	500.000	71.327.000.000
<b>Babi</b>	<b>700</b>	<b>2.310.000.000</b>
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR	700	2.310.000.000
<b>Kambing Potong</b>	<b>20.000</b>	<b>61.000.000.000</b>
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI	5.000	15.250.000.000
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	5.000	15.250.000.000
BALAI VETERINER MEDAN	4.000	12.200.000.000
BALAI VETERINER BANJARBARU	4.000	12.200.000.000
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR	2.000	6.100.000.000
<b>Kerbau</b>	<b>1.050</b>	<b>19.950.000.000</b>
BALAI BESAR VETERINER MAROS, SULAWESI SELATAN	650	12.350.000.000
BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI	400	7.600.000.000

Tabel 17. Alokasi Anggaran Pengadaan Ternak di UPT T.A. 2021



## ALOKASI ANGGARAN BANPER TERNAK 2021

Pengadaan Ternak		OPD	
Rincian		Vol (ekor)	Jumlah (Rp)
<b>Sapi Perah</b>		<b>452</b>	<b>13.574.500.000</b>
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	PROVINSI JAWA BARAT	124	3.418.900.000
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROVINSI JAWA TENGAH	60	2.258.900.000
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DIY	24	518.900.000
DINAS PETERNAKAN	PROVINSI JAWA TIMUR	80	2.838.900.000
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	PROVINSI SUMATERA UTARA	40	1.140.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROVINSI SUMATERA BARAT	64	1.658.900.000
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROVINSI LAMPUNG	20	580.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROVINSI SULAWESI SELATAN	40	1.160.000.000
<b>Kerbau Perah</b>		<b>200</b>	<b>5.700.000.000</b>
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	PROVINSI SUMATERA UTARA	40	1.140.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROVINSI SUMATERA BARAT	40	1.140.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROVINSI SULAWESI SELATAN	40	1.140.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	80	2.280.000.000
<b>Kambing Perah</b>		<b>380</b>	<b>1.938.000.000</b>
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	PROVINSI JAWA BARAT	60	306.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROVINSI JAWA TENGAH	60	306.000.000
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DIY	60	306.000.000
DINAS PETERNAKAN	PROVINSI JAWA TIMUR	60	306.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROVINSI LAMPUNG	60	306.000.000
DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	40	204.000.000
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PROVINSI BALI	40	204.000.000
<b>Babi</b>		<b>700</b>	<b>7.560.000.000</b>
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PROVINSI PAPUA	300	3.240.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROVINSI PAPUA BARAT	400	4.320.000.000

Tabel 18. Alokasi Anggaran Pengadaan Ternak di OPD T.A. 2021

### 3.3. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021

Guna mendukung pelaksanaan program/kegiatan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan agar berjalan sesuai dengan rencana, upaya-upaya persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tanggal 10 Desember 2020, terkait pelaksanaan kegiatan tahun 2021: (i) Penyiapan instrumen pengelola keuangan; (ii) Reviu Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); (iii) Instruksi akselerasi pelaksanaan kegiatan.
- b. Koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan Kegiatan T.A.2021 dengan UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan) pada tanggal 26–28 November 2020.
- c. Telah dilaksanakan input Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) T.A. 2021 tanggal 3 Desember 2020.
- d. Proses lelang praDIPA mulai bulan Desember 2020, Target Kontrak Minggu I dan II bulan Januari 2021, dengan nilai Rp 174,5 Miliar (8,21%) dari total Pagu Alokasi Rp 2,13 Trilyun.

Selanjutnya, terkait pelaksanaan Bantuan Pemerintah (Banper) Ternak pada tahun 2021, upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Dirjen terkait Petunjuk Teknis Kegiatan telah diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2020.
- b. Target Usulan Calon Penerima/ Calon Lokasi (CP/CL) minggu ke II bulan Januari 2021.
- c. Proses Lelang ditargetkan minggu I dan II bulan Februari 2021.

- d. Telah dilakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli Anggota Komisi IV DPR RI tanggal 3 Desember 2020.

## IV. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020 disusun untuk memberikan informasi pencapaian Program/Kegiatan sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun berikutnya sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

Secara umum capaian Program/Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2020 berhasil dilaksanakan dengan nilai realisasi anggaran maupun realisasi fisik berada di atas 90% dari target yang telah ditetapkan. Capaian nilai realisasi anggaran pada tahun 2020 sebesar 96,43% (Rp 1.253.144.887.704 dari Rp 1.299.595.278.000) dan untuk capaian fisik berada pada rentang 99,67% s.d. 169,73%. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan, serta segenap jajaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam peningkatan kinerja masing-masing unit kerja. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020. Beberapa keberhasilan yang sudah diraih dari intervensi program yang dilakukan oleh Ditjen PKH, diantaranya:

- a. Pengembangan ternak ruminansia (sapi/kerbau) melalui optimalisasi reproduksi dari tahun 2018-2020 mampu menambah kelahiran sebanyak 4.126.452 ekor dan menurunkan impor daging sapi sebesar 1,43% pada tahun 2020 dari tahun 2019. Namun demikian, pengembangan sapi potong di Indonesia, saat ini terkendala belum banyaknya pengembangan budidaya yang berskala ekonomi.
- b. Produksi daging khususnya ruminansia kecil telah mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan sudah ekspor ke Brunei Darussalam dan Malaysia.
- c. Produksi unggas (telur dan daging ayam ras) saat ini sudah swasembada, bahkan sudah ekspor ke beberapa negara, namun terdapat kendala di aspek hilirisasi untuk pasar dalam negeri.
- d. Produksi susu nasional tahun 2020 sebesar 947.685 ton atau mengalami kenaikan sebesar 0,33% dari pada tahun 2019. Impor susu juga mengalami penurunan sebanyak 2,08% pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan impor susu pada tahun 2019. Namun produksi susu belum mampu mencukupi kebutuhan nasional.

Untuk menjawab permasalahan terkait dengan ketersediaan daging sapi/kerbau, ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh Ditjen PKH, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait.





- b. Menyusun program terobosan sebagai solusi untuk akselerasi percepatan peningkatan populasi dan produksi sapi/kerbau di dalam negeri.
- c. Penambahan impor bibit sapi indukan untuk meningkatkan jumlah induk sapi/kerbau dalam negeri dengan mengantisipasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tahun-tahun sebelumnya.
- d. Memperkuat kelembagaan peternakan melalui pengembangan Kawasan peternakan berbasis korporasi.
- e. Mendorong pembiayaan yang bersumber dari non APBN antara lain: kredit perbankan, kerja sama investasi antar negara.
- f. Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan masif.
- g. Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah (Provinsi dan kabupaten/kota).

Untuk mengatasi permasalahan terkait upaya stabilisasi harga unggas, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan Ditjen PKH Kementerian Pertanian, antara lain: (1) Koordinasi dengan Kementerian terkait untuk mendorong adanya Roadmap Perunggasan Nasional; (2) Mendorong pelaku usaha untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan; (3) Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas produknya sesuai dengan standar internasional dan melakukan ekspor; (4) Mendorong peningkatan skala usaha peternakan yang berorientasi bisnis, agar tercipta efisiensi dan daya saing usaha, serta peningkatan nilai tambah; (5) Mendorong investasi di industri hilir dan perluasan negara tujuan ekspor.

Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan terkait persusuan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan Ditjen PKH Kementerian Pertanian, antara lain: (1) Perlu menambah anggaran untuk *men-support* pengembangan sapi perah yang sangat terbatas, apabila dibandingkan dengan anggaran untuk pengembangan sapi potong; (2) Mendorong peningkatan produktivitas susu sapi di tingkat peternak; (3) Mendorong peternak untuk memanfaatkan pembiayaan perbankan untuk meningkatkan kepemilikan sapi perah di tingkat peternak yang masih di bawah skala ekonomis; dan (4) Mendorong kemitraan yang saling menguntungkan.

Demikian penyajian Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 disusun untuk dijadikan informasi dan masukan sehingga pelaksanaan tugas-tugas pada masa yang akan datang akan lebih meningkat dan bermanfaat.





Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian  
Jl. Harsono RM No.3, Gedung C Lantai 6-9 Ragunan, Pasar Minggu-Jakarta Selatan-12550  
Telp. 021-7815580-7815583-7847319  
Fax. 021-7815783  
<http://ditjenpkh.pertanian.go.id>